

## BAB II

### EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2016

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, maka Pemerintah Provinsi Banten melaksanakan pengendalian dan evaluasi. Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan dengan berdasarkan pada kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 dan 2016 sampai dengan Triwulan II.

#### 2.1 EVALUASI DAN CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015

Pemerintah Provinsi Banten pada Tahun 2015 telah melaksanakan 33 urusan, yaitu 25 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan. Penyelenggaraan Urusan tersebut dilaksanakan melalui 78 program dan 1.036 kegiatan yang dilaksanakan oleh 42 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai tugas pokok dan fungsinya.

##### 2.1.1 Penyelenggaraan Urusan Wajib

Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten mengacu pada Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang sebesar Rp4.110.111.573.455,00 dan realisasi sebesar Rp3.162.155.320.167,00 atau sebesar 76,94% dengan realisasi fisik sebesar 95,54%. Adapun Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2015, sebagai berikut:

##### 1. Urusan Wajib Pendidikan

Pada Urusan Wajib Bidang Pendidikan didukung oleh 7 program dan 22 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Pendidikan sebesar Rp290.894.968.200,00 dan realisasi sebesar Rp211.425.301.288,00 atau sebesar 72,68% dengan realisasi fisik sebesar 79,31%, pelaksanaan program dimaksud adalah:

1) Program Pendidikan Anak Usia Dini.

Pelaksanaan program ini didukung oleh 2 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, dan (2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan TK. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 91,97% dan realisasi keuangan sebesar 91,97%.

2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Pelaksanaan Program ini didukung oleh 3 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Peningkatan Mutu, Akses, dan Tata Kelola Sekolah Dasar, (2) Kegiatan Pemerataan Akses, Peningkatan Mutu dan Tata Kelola SMP, dan (3) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus pada Balai Pelayanan Pendidikan Khusus. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 66,64% dan realisasi keuangan sebesar 66,64%.

3) Program Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun.

Pelaksanaan Program ini didukung oleh 4 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Peningkatan Mutu, Akses dan Tata Kelola SMA, (2) Kegiatan Peningkatan Mutu dan Perluasan Akses Pendidikan Menengah Kejuruan, (3) Kegiatan Perluasan Akses, Sarana dan Peningkatan Mutu Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, dan (4) Kegiatan Pengembangan Wawasan Kebudayaan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 67,60% dan realisasi keuangan sebesar 67,60%.

4) Program Peningkatan Mutu, Kesejahteraan dan Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pelaksanaan Program ini didukung oleh 3 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik Formal, (2) Kegiatan Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal, dan (3) Kegiatan Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan Formal. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 94,49% dan realisasi keuangan sebesar 94,49%.

5) Program Pendidikan Tinggi.

Pelaksanaan Program ini didukung oleh 1 kegiatan, yaitu: Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Realisasi fisik

kumulatif pada program dimaksud sebesar 76,24% dan realisasi keuangan sebesar 76,24%.

6) Program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) .

Pelaksanaan Program ini didukung oleh 6 kegiatan, yaitu : (1) Kegiatan Pengembangan Program pada BPPNF, (2) Kegiatan Peningkatan Sumber Daya dan Penyediaan Peralatan pada BPPNF, (3) Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan, (4) Kegiatan Gerakan Pemberantasan Buta Aksara, (5) Kegiatan Perluasan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, dan (6) Kegiatan Pemasarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 69,97% dan realisasi keuangan sebesar 69,97%.

7) Program Peningkatan Mutu Tata Kelola dan Pencitraan Pendidikan.

Pelaksanaan Program ini didukung oleh 3 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pengembangan Teknologi Pendidikan pada Balai Teknologi dan Informasi, (2) Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan SMAN CMBBS, dan (3) Kegiatan Pengembangan Komunikasi dan Informasi Pendidikan pada Balai Teknologi dan Informasi. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 88,23% dan realisasi keuangan sebesar 88,23%.

2. Urusan Wajib Kesehatan

Pada Urusan Wajib Bidang Kesehatan didukung oleh 6 program dan 35 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten, RSUD Banten dan RSUD Malingping. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Kesehatan sebesar Rp178.560.324.282,00 dan realisasi sebesar Rp152.319.090.163,00 atau sebesar 85,30% dengan realisasi fisik sebesar 96,17%, pelaksanaan program dimaksud adalah:

1) Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten dengan melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat, (2) Kegiatan Pembinaan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi, dan (3) Kegiatan Pembinaan

Kualitas Pelayanan Kesehatan Anak. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 99,26% dan realisasi keuangan sebesar 89,75%.

2) Program Pembinaan Upaya Kesehatan.

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten, dan RSUD Banten yang terbagi atas 12 kegiatan, antara lain: Dinas Kesehatan Provinsi Banten melaksanakan 6 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar Pada Masyarakat, (2) Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan, (3) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin, (4) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan, (5) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah, dan (6) Kegiatan Peningkatan Pengendalian Mutu Balai Laboratorium Kesehatan Daerah, dengan realisasi Fisik sebesar 97,97% dan realisasi keuangan sebesar 88,74%, sedangkan RSUD Banten melaksanakan 6 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Medis RSUD Banten, (2) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Non Medis RSUD Banten, (3) Kegiatan Peningkatan Operasional Pelayanan Kesehatan, (4) Kegiatan Pemantauan Pelayanan Kesehatan, (5) Kegiatan Peningkatan Asuhan, Etika dan Mutu Keperawatan, dan (6) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Keperawatan, dengan realisasi Fisik sebesar 94,82% dan realisasi keuangan sebesar 84,39%. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 96,40% dan realisasi keuangan sebesar 84,93%.

3) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten dengan melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, (2) Kegiatan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, (3) Kegiatan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PPTM), (4) Kegiatan Pembinaan Surveillance Epidemiologi, Imunisasi dan Penanggulangan Wabah, dan (5) Kegiatan Penyehatan Lingkungan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 95,98% dan realisasi keuangan sebesar 82,93%.

4) Program Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan.

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten dengan melaksanakan 2 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, dan (2) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kefarmasian, Produksi dan Distribusi. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 93,21%.

5) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten dan RSUD Malingping yang terbagi atas 6 kegiatan, antara lain: Dinas Kesehatan Provinsi Banten melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Sertifikasi, Standarisasi dan peningkatan Mutu Sumber daya Manusia Kesehatan, (2) Kegiatan Peningkatan Kajian, Informasi dan Pengembangan Upaya Kesehatan, (3) Kegiatan Pengembangan, Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, (4) Kegiatan Peningkatan Program Kesehatan Kerja dan Olahraga, dan (5) Kegiatan Peningkatan Kesehatan Jiwa, dengan realisasi Fisik sebesar 88,48% dan realisasi keuangan sebesar 91,50%, sedangkan RSUD Malingping melaksanakan 1 kegiatan, yaitu: Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Bagi Tenaga Kesehatan di RSUD Malingping, dengan realisasi Fisik sebesar 96,44% dan realisasi keuangan sebesar 82,89%. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 92,46% dan realisasi keuangan sebesar 91,18%.

6) Program Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat.

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten, RSUD Malingping, dan RSUD Banten yang terbagi atas 7 kegiatan, antara lain: Dinas Kesehatan Provinsi Banten melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan di RS dan Labkesda, (2) Kegiatan Peningkatan Pembinaan Promosi Kesehatan dan Surveillance Kesehatan kerja, dan (3) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pekerja dan Masyarakat Dilingkungan Kerja, dengan realisasi Fisik sebesar 97,18% dan realisasi keuangan sebesar 93,21%, RSUD Malingping melaksanakan 2 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pengadaan Obat-Obatan dan Alat

Kesehatan RSUD Malingping, dan (2) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin, dengan realisasi Fisik sebesar 86,27% dan realisasi keuangan sebesar 67,33%, sedangkan RSUD Banten melaksanakan 2 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Penyediaan Rekam Medis dan Pelaporan, dan (2) Kegiatan Pengadaan Sistem Informasi Manajemen RSUD Banten, dengan realisasi Fisik sebesar 95,37% dan realisasi keuangan sebesar 82,59%. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 92,94% dan realisasi keuangan sebesar 78,76%.

### 3. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Pada Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup didukung oleh 2 program dan 13 kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup sebesar Rp18.512.178.000,00 dan realisasi sebesar Rp16.935.657.418,00 atau sebesar 91,48% dengan realisasi fisik sebesar 100%, pelaksanaan program dimaksud adalah:

#### 1) Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.

Program ini dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten dengan melaksanakan 8 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan, (2) Kegiatan Pengendalian Pengelolaan Limbah Domestik dan Limbah B3, (3) Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan, (4) Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan, (5) Kegiatan Peningkatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, (6) Kegiatan Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan, (7) Kegiatan Pengujian dan Analisis Lab untuk Seluruh Komponen Lingkungan, dan (8) Kegiatan Peningkatan Jaminan Mutu Lab Lingkungan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 90,94%.

#### 2) Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.

Program ini dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi

Banten yang terbagi atas 5 kegiatan, antara lain: Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten melaksanakan 2 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Kerusakan Sumberdaya Alam, dan (2) Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Daya Air, dengan realisasi Fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 93,14%, dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, (2) Kegiatan Perlindungan dan Rehabilitasi Tahura Banten, dan (3) Kegiatan Pengembangan Tahura Banten (DAK), dengan realisasi Fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 91,69%. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 91,48%.

#### 4. Urusan Wajib Pekerjaan Umum.

Pada Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum didukung oleh 3 Program dan 55 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten, dan Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp1.966.970.855.021,00 dan realisasi sebesar Rp1.400.040.117.051,00 atau sebesar 71,18% dengan realisasi fisik sebesar 89,66%, pelaksanaan program dimaksud adalah:

##### 1) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten dengan melaksanakan 24 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pembangunan Jalan Wilayah Utara, (2) Kegiatan Pembangunan Jalan Wilayah Selatan, (3) Kegiatan Pembangunan Jembatan, (4) Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Tangerang, (5) Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Serang dan Cilegon, (6) Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Pandeglang, (7) Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Lebak, (8) Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong Jalan, (9) Kegiatan Pembangunan TPT, Talud dan Bronjong, (10) Kegiatan Pengadaan Lahan Kebinamargaan, (11) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan, (12) Kegiatan

Pengawasan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kebinamargaan, (13) Kegiatan Pengadaan Alat-alat Ukur Kebinamargaan dan Pengujian Kualitas Bahan, (14) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Bahan-Bahan Kebinamargaan Wilayah Tangerang, (15) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Bahan-Bahan Kebinamargaan Wilayah Pandeglang, (16) Kegiatan Pembangunan Jalan Prioritas Tahun Jamak, (17) Kegiatan Pendataan Leger Jalan, (18) Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan Perijinan Bidang Bina Marga dan Tata Ruang, (19) Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Kebinamargaan Wilayah Tangerang, (20) Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Kebinamargaan Wilayah Serang dan Cilegon, (21) Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Kebinamargaan Wilayah Pandeglang, (22) Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Kebinamargaan Wilayah Lebak, (23) Kegiatan Pembangunan Jalan Wilayah Utara (Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2014), dan (24) Kegiatan Pembangunan Jalan Wilayah Selatan (Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2014). Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 91,67% dan realisasi keuangan sebesar 78,77%.

2) Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air.

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten dengan melaksanakan 21 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya, (2) Kegiatan Pengadaan Lahan Pengairan, (3) Kegiatan Pengelolaan Kualitas Air Pada Daerah Aliran Sungai, (4) Kegiatan Pengendalian Banjir, (5) Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air pada BPSDA Cidurian-Cisadane, (6) Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air pada BPSDA Ciujung-Cidanau, (7) Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air pada BPSDA Ciliman-Cisawarna, (8) Kegiatan Pengadaan Bahan Banjiran, (9) Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai, (10) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan, Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, (11) Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Sumber Daya Air pada BPSDA Ciliman-Cisawarna, (12) Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Sumber Daya Air pada BPSDA Ciujung-Cidanau, (13) Kegiatan Optimalisasi Fungsi



Jaringan Sumber Daya Air pada BPSDA Cidurian-Cisadane, (14) Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sumber Daya Air, (15) Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan Perizinan Bidang Sumber Daya Air, (16) Kegiatan Perencanaan Teknis Sungai, Irigasi, Embung dan Jaringan Pengairan Lainnya, (17) Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pemukiman dan SDA Terpadu, (18) Kegiatan Pengawasan Teknis Bidang Sumber Daya Air, (19) Kegiatan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air dan Pemukiman, (20) Kegiatan Pengendalian Banjir (Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2014) , dan (21) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan, Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya (Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2014). Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 92,37% dan realisasi keuangan sebesar 60,58%.

3) Program Pengembangan dan Revitalisasi Infrastuktur Permukiman.

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten dengan melaksanakan 10 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih, (2) Kegiatan Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan dan Persampahan, (3) Kegiatan Peningkatan Prasarana Lingkungan Kawasan Binaan, (4) Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Infrastruktur Penunjang Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) , (5) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor di KP3B, (6) Kegiatan Penyelenggaraan dan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan, (7) Kegiatan Perencanaan DED Gedung Kantor dan Infrastruktur Keciptakaryaannya Lainnya, (8) Kegiatan Pengawasan Teknis Bidang Pemukiman, (9) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor di KP3B (Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2014), dan (10) Kegiatan Penyelenggaraan dan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan (Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2014). Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 84,95% dan realisasi keuangan sebesar 51,31%.

5. Urusan Wajib Penataan Ruang.

Pada Urusan Wajib Bidang Penataan Ruang didukung oleh 1 Program dan 3 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan

Wajib Bidang Penataan Ruang sebesar Rp6.647.356.950,00 dan realisasi sebesar Rp6.488.382.800,00 atau sebesar 97,61% dengan realisasi fisik sebesar 99,04%, pelaksanaan program dimaksud adalah Program Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan.

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten yang terbagi atas 3 Kegiatan, antara lain: Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten melaksanakan 2 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Ruang, dan (2) Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dengan realisasi fisik sebesar 98,07% dan realisasi keuangan sebesar 98,10%, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten melaksanakan 1 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,03%. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 99,04% dan realisasi keuangan sebesar 97,61%.

#### 6. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan.

Pada Urusan Wajib Bidang Perencanaan Pembangunan didukung oleh 3 program dan 18 kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten, Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten, dan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Perencanaan Pembangunan sebesar Rp28.565.950.800,00 dan realisasi sebesar Rp26.032.120.882,00 atau sebesar 91,13% dengan realisasi fisik sebesar 98,89%, pelaksanaan program dimaksud adalah:

- 1) Program Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah.  
Program ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten dengan melaksanakan 9 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah, (2) Kegiatan Perencanaan Anggaran Pembangunan Daerah, (3) Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Indagkop, Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata, (4) Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Ketahanan Pangan dan Agribisnis, (5) Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

Infrastruktur Wilayah, (6) Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban, (7) Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Gender, (8) Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran SDM, Budaya dan Keagamaan, dan (9) Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Tata Pemerintahan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 94,73%.

2) Program Pengendalian Pembangunan Daerah.

Program ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten, dan Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten yang terbagi atas 7 kegiatan, antara lain: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten melaksanakan 4 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program APBD, (2) Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program APBN dan Dana Lainnya, (3) Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah, dan (4) Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Informasi (KP3EI) Provinsi Banten, dengan realisasi fisik sebesar 99,64% dan realisasi keuangan sebesar 89,83%, dan Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan, (2) Kegiatan Penyusunan Laporan Pelaksanaan APBD, dan (3) Kegiatan Pengendalian Laporan Realisasi Barang/Jasa Se-Provinsi Banten, dengan realisasi fisik sebesar 97,04% dan realisasi keuangan sebesar 87,55%. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 98,34% dan realisasi keuangan sebesar 88,36%.

3) Program Kerjasama Pembangunan Daerah.

Program ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten dan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten yang terbagi atas 2 kegiatan, antara lain: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten melaksanakan 1 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 94,90%, dan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten melaksanakan 1 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan

Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri dengan realisasi fisik sebesar 96,67% dan realisasi keuangan sebesar 65,53%. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 98,34% dan realisasi keuangan sebesar 81,99%.

#### 7. Urusan Wajib Perumahan.

Pada Urusan Wajib Bidang Perumahan didukung oleh 1 program dan 2 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Perumahan sebesar Rp50.296.262.000,00 dan realisasi sebesar Rp46.004.598.650,00 atau sebesar 91,47% dengan realisasi fisik sebesar 96,42%, pelaksanaan program dimaksud adalah Program Pembinaan dan Penataan Perumahan.

Program ini melaksanakan 2 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu, dan (2) Kegiatan Pembinaan dan Penataan Perumahan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 96,42% dan realisasi keuangan sebesar 91,47%.

#### 8. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga

Pada Urusan Wajib Bidang Kepemudaan dan Olah Raga didukung oleh 2 program dan 18 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp36.111.676.100,00 dan realisasi sebesar Rp33.931.161.760,00 atau sebesar 93,96% dengan realisasi fisik sebesar 99,17%, pelaksanaan program dimaksud adalah:

##### 1) Program Kepemudaan dan Kepramukaan

Program ini melaksanakan 7 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pemberian Penghargaan dan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kepemudaan, (2) Kegiatan Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda, (3) Kegiatan Pembinaan Kepramukaan, (4) Kegiatan Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda, (5) Kegiatan Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda, (6) Kegiatan Penguatan Kelembagaan Kepemudaan, dan (7) Kegiatan Pengembangan dan Standarisasi Sarana Kepemudaan. Realisasi fisik kumulatif pada

program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 95,26%.

2) Program Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga

Program ini melaksanakan 11 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pembinaan Manajemen Pengelolaan Organisasi dan Penyelenggara Kejuaraan Olahraga, (2) Kegiatan Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus, (3) Kegiatan Pelayanan dan Pengawasan Organisasi keolahragaan, (4) Kegiatan Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga, (5) Kegiatan Peningkatan SDM Keolahragaan, (6) Kegiatan Peningkatan Prestasi dan Pembibitan Olahraga, (7) Kegiatan Fasilitasi Prasarana dan Sarana olahraga, (8) Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Atlet PPLP Tahun 2015, (9) Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar, (10) Kegiatan Pembinaan Marching Band Gita Surosowan, dan (11) Kegiatan Penyusunan dan Rencana Pengelolaan Sekolah Khusus Olahraga (SKO). Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 98,34% dan realisasi keuangan sebesar 93,57%.

9. Urusan Wajib Penanaman Modal.

Pada Urusan Wajib Bidang Penanaman Modal didukung oleh 2 program dan 5 kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Penanaman Modal sebesar Rp11.314.936.000,00 dan realisasi sebesar Rp9.109.362.386,00 atau sebesar 80,51% dengan realisasi fisik sebesar 93,17%, pelaksanaan program dimaksud adalah:

1) Program Peningkatan Iklim Investasi.

Program ini melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pengendalian dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, (2) Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu, dan (3) Kegiatan Fasilitasi Percepatan Realisasi Izin Usaha Tetap Penanaman Modal. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 86,33% dan realisasi keuangan sebesar 83,79%.

2) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

Program ini melaksanakan 2 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal, dan (2) Kegiatan Kerjasama Investasi. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 79,16%.

10. Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pada Urusan Wajib Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah didukung oleh 3 program dan 10 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp21.977.740.700,00 dan realisasi sebesar Rp20.322.357.600,00 atau sebesar 92,47% dengan realisasi fisik sebesar 100%, pelaksanaan program dimaksud adalah:

1) Program Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM.

Program ini melaksanakan 4 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Peningkatan Akses Pembiayaan dan Penjaminan Kredit bagi K-UMKM, (2) Kegiatan Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Industri Hasil Pertanian, (3) Kegiatan Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Aneka Usaha, dan (4) Kegiatan Peningkatan Kompetensi Usaha Kecil, Menengah dan Pengelola Koperasi. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,54%.

2) Program Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM.

Program ini melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pengembangan Wirausaha Baru Melalui Inkubator Teknologi Bisnis, (2) Kegiatan Dukungan Promosi dan Pemasaran Produk serta Peningkatan Kapasitas Kerjasama dan Jaringan Usaha, dan (3) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pengembangan Teknologi, Pasar dan Pemasaran Produk Unggulan K-UMKM. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 82,14%.

3) Program Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM K-UMKM.

Program ini melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi, (2) Kegiatan

Pengembangan Sistem Akuntabilitas Koperasi, dan (3) Kegiatan Pelatihan Bagi Pengurus Koperasi dan UMKM. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 93,63%.

#### 11. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pada Urusan Wajib Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil didukung oleh 1 program dan 2 kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp1.295.556.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.114.648.290,00 atau sebesar 86,04% dengan realisasi fisik sebesar 100%, pelaksanaan program dimaksud adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan.

#### 12. Urusan Wajib Ketenagakerjaan.

Pada Urusan Wajib Bidang Ketenagakerjaan didukung oleh 3 program dan 14 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Ketenagakerjaan sebesar Rp31.917.162.800,00 dan realisasi sebesar Rp28.270.307.707,00 atau sebesar 88,57% dengan realisasi fisik sebesar 97,91%, pelaksanaan program dimaksud adalah:

##### 1) Program Pengembangan Kelembagaan, Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja.

Program ini melaksanakan 7 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Peningkatan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan, (2) Kegiatan Peningkatan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), (3) Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dan Anak, (4) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tenaga Kerja, (5) Kegiatan Penyiapan Pelaksanaan Penetapan UMP, (6) Kegiatan Peningkatan Pemasarakatan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, dan (7) Kegiatan Fasilitasi Pengawas Ketenagakerjaan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 98,64% dan realisasi keuangan sebesar 93,04%.

2) Program Peningkatan Produktivitas, Perluasan, Kesempatan Kerja dan Berusaha.

Program ini melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pelatihan Produktivitas dan Peningkatan Keterampilan Pencari Kerja dan Tenaga Daerah, (2) Kegiatan Pelatihan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri, (3) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja, (4) Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan, dan (5) Kegiatan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 96,14% dan realisasi keuangan sebesar 88,28%.

3) Program Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja.

Program ini melaksanakan 2 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja BLKI Provinsi Banten, dan (2) Kegiatan Sosialisasi Identifikasi Kebutuhan Pelatihan dan Penempatan Hasil Pelatihan BLKI. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 98,95% dan realisasi keuangan sebesar 84,31%.

### 13. Urusan Wajib Ketahanan Pangan.

Pada Urusan Wajib Bidang Ketahanan Pangan didukung oleh 1 program dan 10 kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Ketahanan Pangan sebesar Rp13.060.210.000,00 dan realisasi sebesar Rp11.227.222.573,00 atau sebesar 85,97% dengan realisasi fisik sebesar 92,93%, pelaksanaan program dimaksud adalah Program Ketahanan Pangan Masyarakat.

Program ini melaksanakan 10 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pengelolaan dan Penanganan Kerawanan Pangan, (2) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Ketersediaan dan Akses Pangan, (3) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Cadangan Pangan, (4) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Distribusi dan Harga Pangan, (5) Kegiatan Pengendalian Program Bantuan Raskin, (6) Kegiatan Pembinaan, Pengelolaan dan Pengembangan Keamanan Pangan, (7) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, (8) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten, (9) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Distribusi Cadangan Pangan



Pemerintah, dan (10) Kegiatan Fasilitasi Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 92,93% dan realisasi keuangan sebesar 85,97%.

14. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pada Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didukung oleh 1 program dan 8 kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp10.350.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp9.897.118.400,00 atau sebesar 95,62% dengan realisasi fisik sebesar 99,50%, pelaksanaan program dimaksud adalah Program Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Program ini melaksanakan 8 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Peningkatan Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak, (2) Kegiatan Penguatan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Dunia Usaha, (3) Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak, (4) Kegiatan Penguatan Organisasi Perempuan, (5) Kegiatan Penguatan Jaringan Kerja Pengarusutamaan Gender, (6) Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), (7) Kegiatan Koordinasi, integrasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, dan (8) Kegiatan Penguatan Kelembagaan Posyandu. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 99,50% dan realisasi keuangan sebesar 95,62%.

15. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Pada Urusan Wajib Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera didukung oleh 1 program yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebesar Rp500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp488.990.000,00 atau sebesar 97,80% dengan realisasi fisik sebesar 100%, pelaksanaan

program dimaksud adalah Program Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Program ini melaksanakan 1 kegiatan, yaitu: Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Program Keluarga Berencana. Realisasi fisik pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,80%.

#### 16. Urusan Wajib Perhubungan.

Pada Urusan Wajib Bidang Perhubungan didukung oleh 1 program dan 17 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Perhubungan sebesar Rp53.322.437.700,00 dan realisasi sebesar Rp44.471.479.749,00 atau sebesar 83,40% dengan realisasi fisik sebesar 96,90%, pelaksanaan program dimaksud adalah Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian.

Program ini melaksanakan 17 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas Jalan, (2) Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan, (3) Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan Fasilitas Jembatan Timbang pada UPT Serang, (4) Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan Fasilitas Jembatan Timbang pada UPT Tangerang, (5) Kegiatan Pengendalian dan Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan, (6) Kegiatan Penyelenggaraan Perhubungan Udara, (7) Kegiatan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut dan Penyeberangan, (8) Kegiatan Penyelenggaraan Keselamatan Pelayaran dan Pengendalian Pemantauan Angkutan Laut, (9) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Barang dan Kereta Api, (10) Kegiatan Penyelenggaraan Teknik Sarana dan Prasarana Transportasi, (11) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Penumpang, (12) Kegiatan Penataan dan Peningkatan Pelayanan Perhubungan pada UPT Serang, (13) Kegiatan Penataan dan Peningkatan Pelayanan Perhubungan pada UPT Tangerang, (14) Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan Fasilitas Jembatan Timbang Pada UPT Tangerang Selatan, (15) Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan Fasilitas Jembatan Timbang Pada UPT Lebak-Pandeglang, (16) Kegiatan Penataan dan Peningkatan Pelayanan

Perhubungan Pada UPT Tangerang Selatan, dan (17) Kegiatan Penataan dan Peningkatan Pelayanan Perhubungan Pada UPT Lebak-Pandeglang. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 96,90% dan realisasi keuangan sebesar 83,40%.

#### 17. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika.

Pada Urusan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika didukung oleh 1 program dan 6 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dan Sekretariat Komisi Penyiaran Informasi Daerah Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika sebesar Rp21.651.517.800,00 dan realisasi sebesar Rp17.672.072.973,00 atau sebesar 81,62% dengan realisasi fisik sebesar 92,56%, pelaksanaan program dimaksud adalah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Telematika.

Program ini melaksanakan 6 kegiatan, antara lain: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pengembangan Telekomunikasi dan Telematika, (2) Kegiatan Penyelenggaraan Sarana Telekomunikasi dan Desiminasi Informatika, dan (3) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Publik, dengan realisasi fisik sebesar 95,15% dan realisasi keuangan sebesar 82,15%, dan Sekretariat Komisi Penyiaran Informasi Daerah melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Perizinan Penyiaran, (2) Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyiaran, dan (3) Kegiatan Fasilitasi Pemantauan Isi Siaran Radio dan Televisi dengan realisasi fisik sebesar 89,96% dan realisasi keuangan sebesar 76,46%. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 92,56% dan realisasi keuangan sebesar 81,62%.

#### 18. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Pada Urusan Wajib Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri didukung oleh 1 program dan 9 kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sebesar Rp21.892.037.000,00 dan realisasi sebesar Rp20.177.701.798,00 atau sebesar 92,17% dengan realisasi

fisik sebesar 99,42%, pelaksanaan program dimaksud adalah Program Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik.

Program ini melaksanakan 9 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Budaya Politik Masyarakat di Provinsi Banten, (2) Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi Politik, (3) Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan, (4) Kegiatan Peningkatan Pembauran Kerukunan dan Kewarganegaraan, (5) Kegiatan Peningkatan Pemahaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, (6) Kegiatan Fasilitasi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik, (7) Kegiatan Fasilitasi Penanganan Masalah Perbatasan dan Orang Asing, (8) Kegiatan Fasilitasi Pengawasan dan Pemantauan Ketahanan Ekonomi, dan (9) Kegiatan Fasilitasi Pemilukada Serentak. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 99,42% dan realisasi keuangan sebesar 92,17%.

19. Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Pada Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian didukung oleh 14 program dan 596 kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Provinsi Banten (42 SKPD) . Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian sebesar Rp1.206.068.320.789,00 dan realisasi sebesar Rp976.692.993.702,00 atau sebesar 80,98% dengan realisasi fisik sebesar 93,48%, pelaksanaan program dimaksud adalah:

- 1) Program Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum.

Pada Program ini dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten, Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten, Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten, Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Provinsi Banten, dan Kantor Penghubung Provinsi Banten yang terbagi atas 44 kegiatan, antara lain: Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten

melaksanakan 9 Kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, (2) Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan, (3) Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (4) Kegiatan Fasilitasi Penegasan Batas Daerah, (5) Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten, (6) Kegiatan Penataan Daerah Otonom, (7) Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD, (8) Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan, dan (9) Kegiatan Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pemilu/Pemilukada, dengan realisasi fisik sebesar 94,20% dan realisasi keuangan sebesar 81,99%, Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten melaksanakan 10 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang/Jasa (SHSBJ) dan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan, (2) Kegiatan Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Perindagkop dan UMKM, (3) Kegiatan Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Kelembagaan Keuangan Daerah, (4) Kegiatan Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Infrastruktur Perekonomian, (5) Kegiatan Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Perlindungan Konsumen, Pengawasan Harga dan Barang Beredar, (6) Kegiatan Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan dan Teknologi, (7) Kegiatan Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Kerjasama Perekonomian Investasi dan Industri, (8) Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan LPSE Provinsi Banten, (9) Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan ULP Provinsi Banten, dan (10) Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Penyerapan Anggaran, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 93,91%, Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten melaksanakan 8 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Masalah Sosial, (2) Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Pengembangan Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Nilai-nilai Kejuangan, (3) Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, (4) Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Penguatan Lembaga Sosial, (5) Kegiatan

Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan (6) Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Keluarga Berencana, (7) Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Bantuan Masyarakat dan Transmigrasi, dan (8) Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 85,66%, Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Provinsi Banten melaksanakan 11 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Hubungan dan Kerjasama Pers, (2) Kegiatan Sarana Komunikasi, (3) Kegiatan Liputan dan Pengelolaan Dokumen, (4) Kegiatan Pengembangan Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga, (5) Kegiatan Penerbitan Media dan Teknologi Informasi, (6) Kegiatan Aspirasi dan Pengelolaan Opini Publik, (7) Kegiatan Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi Publik, (8) Kegiatan Optimalisasi Tata Acara Keprotokolan, (9) Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pimpinan, (10) Kegiatan Pelayanan Tamu, dan (11) Kegiatan Penguatan Kelembagaan PPID di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 94,96%, dan Kantor Penghubung melaksanakan 6 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pengelolaan Wisma, (2) Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah, (3) Kegiatan Fasilitasi Pejabat Pemda dan Tamu, (4) Kegiatan Pengelolaan Layanan Informasi Promosi Banten, (5) Kegiatan Fasilitasi Promosi Produk dan Potensi Unggulan Daerah, dan (6) Kegiatan Partisipasi Anjungan Banten pada Kegiatan di TMII, dengan realisasi fisik sebesar 88,57% dan realisasi keuangan sebesar 90,46%. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 96,55% dan realisasi keuangan sebesar 91,06%.

2) Program Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.

Program ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dengan melaksanakan 9 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Fasilitasi Pengamanan Hari Besar Nasional, Kantor Pemerintah dan Rumah Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, (2) Kegiatan Pemeliharaan dan Penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban Umum, (3) Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah

Provinsi Banten, (4) Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan, (5) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Penguatan Potensi Anggota Satuan Linmas, (6) Kegiatan Kerjasama Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, (7) Kegiatan Optimalisasi Penyelenggaraan Teknis Fungsional Satpol PP Provinsi Banten, (8) Kegiatan Pemantapan Tugas Anggota Satpol PP, dan (9) Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Mediasi dan Komunikasi Pendayagunaan Satuan Linmas. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 98,36% dan realisasi keuangan sebesar 96,75%.

3) Program Penanggulangan Bencana.

Program ini dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten dengan melaksanakan 7 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pencegahan dan Penyebarluasan Informasi Peringatan Dini Bencana, (2) Kegiatan Peningkatan Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana, (3) Kegiatan Penanganan Kedaruratan Bencana, (4) Kegiatan Fasilitasi Dukungan Peralatan dan Logistik Kebencanaan, (5) Kegiatan Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana, (6) Kegiatan Pemulihan Kondisi Sarana Prasarana Lokasi Pasca Bencana, dan (7) Kegiatan Pusdalops PB. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 99,81% dan realisasi keuangan sebesar 86,09%.

4) Program Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah.

Program ini dilaksanakan oleh Biro Perlengkapan dan Aset Provinsi Banten dengan melaksanakan 7 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Penatausahaan Aset Daerah, (2) Kegiatan Pemanfaatan dan Investasi Kekayaan Daerah, (3) Kegiatan Penyelesaian TPTGR dan Penghapusan Barang Daerah, (4) Kegiatan Pendistribusian dan Pemanfaatan Aset Daerah, (5) Kegiatan Perencanaan Program dan Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Pembangunan, (6) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Provinsi Banten, dan (7) Kegiatan Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pemerintah Provinsi Banten. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 73,36% dan realisasi keuangan sebesar 52,40%.

5) Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten dengan melaksanakan 32 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah, (2) Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Pajak Daerah, (3) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Dana Perimbangan dan Retribusi, (4) Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Balaraja, (5) Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Cikande, (6) Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Cikokol, (7) Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Ciledug, (8) Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Cilegon, (9) Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Ciputat, (10) Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Malingping, (11) Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Pandeglang, (12) Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Rangkasbitung, (13) Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Serang, (14) Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Serpong, (15) Kegiatan Pembinaan dan Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota, (16) Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran APBD Provinsi Banten TA 2015, (17) Kegiatan Penyusunan Laporan Pada Koordinator Unit Akuntansi Perwakilan Wilayah, (18) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2014 dan Interim Tahun 2015 Provinsi Banten, (19) Kegiatan Pembinaan Akuntansi SKPD dan Implementasi Aplikasi SIMDA, (20) Kegiatan Penatausahaan Realisasi Keuangan Daerah, (21) Kegiatan Penatausahaan Kas Daerah, (22) Kegiatan Penyusunan Pedoman Anggaran, (23) Kegiatan Penyusunan Raperda Perubahan APBD 2015 dan APBD 2016, (24) Kegiatan Penyusunan Rapergub Penjabaran APBD, Verifikasi Dokumen Pelaksanaan dan Pergeseran Anggaran, (25) Kegiatan Evaluasi Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Se-Provinsi Banten dan Raper KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Se-Provinsi Banten TA. 2014, (26) Kegiatan Evaluasi Raperda Kab/Kota dan Raper KDH Perubahan



APBD TA 2015 dan APBD TA 2016, (27) Kegiatan Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah, (28) Kegiatan Pembinaan Pengendalian Keuangan Daerah, (29) Kegiatan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan, (30) Kegiatan Pemeliharaan Standarisasi Mutu Pelayanan, (31) Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan (32) Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 84,52% dan realisasi keuangan sebesar 84,52%.

6) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah.

Program ini dilaksanakan oleh Biro Organisasi Provinsi Banten dengan melaksanakan 7 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah, (2) Kegiatan Penataan Kelembagaan Lembaga Lain Bagian Perangkat Daerah dan Pembinaan dan Fasilitasi Raperda/Perda Organisasi Perangkat Daerah Kab/Kota, (3) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Ketatalaksanaan, (4) Kegiatan Penyusunan Uraian Tugas, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Perangkat Daerah, (5) Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Manajerial PNS, (6) Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dan (7) Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 88,35% dan realisasi keuangan sebesar 88,85%.

7) Program Pembinaan Karier dan Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah.

Program ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten dengan melaksanakan 9 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Penanganan Kasus Disiplin PNS Provinsi Banten, (2) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai dan Pembinaan Mental Pegawai, (3) Kegiatan Penataan, Penempatan Kerja Pegawai dan Fasilitasi Persiapan PNS Masa Purna Tugas, (4) Kegiatan Fasilitasi Kepangkatan dan Penggajian, (5) Kegiatan Pengembangan Jabatan Fungsional dan Sidang Baperjakat, (6)

Kegiatan Peningkatan Kompetensi PNS Provinsi Banten, (7) Kegiatan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD), (8) Kegiatan Pelayanan Data dan Informasi Kepegawaian, dan (9) Kegiatan Peningkatan Manajemen Penatausahaan Kepegawaian. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 89,31% dan realisasi keuangan sebesar 72,49%.

8) Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur.

Program ini dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten dengan melaksanakan 9 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pengembangan Program dan Kerjasama Kelembagaan, (2) Kegiatan Pengembangan Penyelenggaraan Diklat Aparatur, (3) Kegiatan Diklat Kapabilitas Kepemimpinan Bagi Kepala Desa Se-Provinsi Banten, (4) Kegiatan Diklat Struktural Bagi PNS Daerah, (5) Kegiatan Diklat Teknis Penatausahaan Program, (6) Kegiatan Diklat Teknis Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja, (7) Kegiatan Diklat Peningkatan Kompetensi Sumber daya Aparatur, (8) Kegiatan Diklat Manajemen Pemberdayaan Lembaga Pemerintah Daerah, dan (9) Kegiatan Diklat Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah Se-Provinsi Banten. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 98,57% dan realisasi keuangan sebesar 89,86%.

9) Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

Program ini dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (42 SKPD) yang terbagi atas 89 kegiatan. Pada 42 SKPD terdapat 35 SKPD masing-masing melaksanakan 2 kegiatan dengan nama kegiatan yang sama, yaitu: (1) Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, dan (2) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Dari 35 SKPD masing-masing untuk realisasi fisik dan realisasi keuangan terhadap Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut: Dinas Pendidikan realisasi fisik sebesar 88,03% dan realisasi keuangan sebesar 84,05%, Dinas Kesehatan Provinsi Banten realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 94,17%, Dinas SDA dan Permukiman realisasi fisik sebesar 94,74% dan realisasi keuangan sebesar 96,35%, Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten

realisasi fisik sebesar 88,37% dan realisasi keuangan sebesar 86,52%, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten realisasi fisik sebesar 99,25% dan realisasi keuangan sebesar 86,77%, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 89,80%, Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,30%, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 93,48%, Dinas Sosial Provinsi Banten realisasi fisik sebesar 94,41% dan realisasi keuangan sebesar 94,16%, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 74,70%, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 93,02%, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata realisasi fisik sebesar 92,30% dan realisasi keuangan sebesar 80,58%, Dinas Pemuda dan Olahraga realisasi fisik sebesar 99,31% dan realisasi keuangan sebesar 83,79%, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 95,92%, Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten realisasi fisik sebesar 107,03% dan realisasi keuangan sebesar 76,90%, Biro Hukum realisasi fisik sebesar 99,37% dan realisasi keuangan sebesar 91,46%, Biro Organisasi realisasi fisik sebesar 96,97% dan realisasi keuangan sebesar 97,17%, Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 95,77%, Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 68,43%, Biro Perlengkapan dan Aset Daerah realisasi fisik sebesar 98,36% dan realisasi keuangan sebesar 95,95%, Biro Humas dan Protokol realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 91,11%, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah realisasi fisik sebesar 81,59% dan realisasi keuangan sebesar 79,69%, Kantor Inspektorat realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,24%, Badan Kepegawaian Daerah realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 91,43%, Badan Pendidikan dan Pelatihan

realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,50%, Satuan Polisi Pamong Praja realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 91,41%, Badan Penanggulangan Bencana Daerah realisasi fisik sebesar 97,46% dan realisasi keuangan sebesar 87,42%, Kantor Penghubung realisasi fisik sebesar 82,56% dan realisasi keuangan sebesar 84,19%, Sekretariat Komisi Penyiaran Informasi Daerah realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 93,24%, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah realisasi fisik sebesar 98,99% dan realisasi keuangan sebesar 99,34%, Dinas Pertanian dan Peternakan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 87,82%, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 86,79%, Dinas Pertambangan dan Energi realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 94,88%, Dinas Kelautan dan Perikanan realisasi fisik sebesar 86,33% dan realisasi keuangan sebesar 70,21%, Dinas Perindustrian dan Perdagangan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,50%.

Adapun SKPD yang melaksanakan 1 kegiatan adalah RSUD Malingping. Kegiatan yang dimaksud adalah Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, dengan realisasi fisik sebesar 99,36% dan realisasi keuangan sebesar 91,01%, sedangkan 6 SKPD lainnya melaksanakan kegiatan yang terbagi atas 18 kegiatan, antara lain: RSUD Banten melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, (2) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, dan (3) Kegiatan Perbendaharaan dan Verifikasi, dengan realisasi fisik sebesar 95,47% dan realisasi keuangan sebesar 81,72%, Dinas Koperasi dan UMKM melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, (2) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, dan (3) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Balatkop, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 94,88%, Sekretariat DPRD melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, (2) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, dan (3) Kegiatan

Pengelolaan Verifikasi dan Pembukuan Keuangan, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 92,53%, Biro Umum melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, (2) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, dan (3) Kegiatan Pengelolaan Perbendaharaan dan Verifikasi, dengan realisasi fisik sebesar 75,08% dan realisasi keuangan sebesar 77,02%, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, (2) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, dan (3) Kegiatan Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Banten, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,26%, dan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, (2) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, dan (3) Kegiatan Perencanaan UPTB Cadangan Pangan, dengan realisasi fisik sebesar 98,73% dan realisasi keuangan sebesar 85,92%. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 97,04% dan realisasi keuangan sebesar 88,93%.

10) Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur.

Program ini dilaksanakan oleh 37 SKPD dilingkungan Provinsi Banten, dan terbagi atas 348 kegiatan, antara lain: Biro Organisasi melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Pelayanan Perpustakaan Setda, (2) Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai, dan (3) Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Budaya Kerja Aparatur, dengan realisasi fisik sebesar 93,24% dan realisasi keuangan sebesar 93,47%, Biro Umum melaksanakan 14 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (2) Kegiatan Koordinasi Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah, (3) Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Ketatausahaan Setda Provinsi Banten, (4) Kegiatan Pelayanan dan Penataan Kearsipan pada Setda Provinsi Banten, (5) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanditel, (6) Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Pimpinan Daerah, (7) Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Pimpinan Sekretariat Daerah, (8) Kegiatan

Peningkatan Kapasitas Staf Ahli Gubernur Banten, (9) Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kerumahtanggaan Setda Provinsi Banten, (10) Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Dinas Pada Setda Provinsi Banten, (11) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan di Lingkungan Setda Provinsi Banten, (12) Kegiatan Penyelenggaraan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (13) Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Pimpinan Daerah, dan (14) Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Pembayaran gaji dan Tunjangan KDH/WKDH dan Pegawai di lingkungan Setda, dengan realisasi fisik sebesar 79,70% dan realisasi keuangan sebesar 79,66%, Biro Perlengkapan dan Aset melaksanakan 2 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, dan (2) Kegiatan Penyediaan Penunjang Ketatausahaan, dengan realisasi fisik sebesar 92,31% dan realisasi keuangan sebesar 80,38%, Sekretariat DPRD melaksanakan 4 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, dan (4) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 88,18%, Kantor Inspektorat melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan (5) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, dengan realisasi fisik sebesar 95,00% dan realisasi keuangan sebesar 86,13%, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan 4 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, dan (4) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 95,66%, Dinas Kesehatan Provinsi Banten melaksanakan 11 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4) Kegiatan

Peningkatan Kapasitas Aparatur, (5) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah, (6) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat, (7) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat, (8) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat, (9) Kegiatan Penyediaan barang dan jasa perkantoran pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat, (10) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah, dan (11) Kegiatan Penyediaan Barang dan pada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah, dengan realisasi fisik sebesar 98,59% dan realisasi keuangan sebesar 91,85%, Dinas Pendidikan melaksanakan 21 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, (5) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur pada BPPNF, (6) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pada Balai Teknologi dan Informasi, (7) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah, (8) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelayanan Pendidikan Khusus, (9) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai pada Pendidikan Non Formal, (10) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Teknologi dan Informasi, (11) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelayanan Pendidikan Khusus, (12) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pendidikan Non Formal, (13) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Tekhnologi dan Informasi, (14) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pelayanan Pendidikan Khusus, (15) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pendidikan Non Formal, (16) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Teknologi dan Informasi, (17) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada SMAN CMBBS, (18) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada SMAN CMBBS, (19) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada SMAN CMBBS, (20)

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur pada Balai Pelayanan Pendidikan Khusus, dan (21) Kegiatan Penataan Aset dan Arsip Dinas Pendidikan Provinsi Banten, dengan realisasi fisik sebesar 84,19% dan realisasi keuangan sebesar 76,49%, Dinas Pemuda dan Olahraga melaksanakan 9 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, (5) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, (6) Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga, (7) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga, (8) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga, dan (9) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga, dengan realisasi fisik sebesar 99,78% dan realisasi keuangan sebesar 89,02%, Dinas Pertanian dan Peternakan melaksanakan 25 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, (5) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, (6) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, (7) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, (8) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengembangan Peternakan, (9) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura, (10) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, (11) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, (12) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, (13) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengembangan Peternakan, (14) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan



Prasarana Kantor Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura, (15) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, (16) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, (17) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, (18) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Pengembangan Peternakan, (19) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura, (20) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, (21) Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi /Renovasi UPTD Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Penyediaan Sarana Pendukung (DAK), (22) Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Renovasi UPTD Balai Sertifikasi Tanaman Pangan Hortikultura dan Sarana Pendukungnya (DAK), (23) Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/Renovasi UPTD Balai Perbibitan Peternakan dan Penyediaan Sarana Pendukung (DAK), (24) Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung Laboratorium Keswan (DAK), dan (25) Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung Laboratorium Pakan (DAK), dengan realisasi fisik sebesar 96,32% dan realisasi keuangan sebesar 88,52%, Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan 17 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, (5) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah, (6) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan, (7) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Budidaya Ikan Air Tawar, (8) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Budidaya Ikan Pantai, (9) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pelabuhan Perikanan Pantai, (10) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan, (11) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor pada Balai Budidaya Ikan Air Tawar, (12) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Budidaya Ikan Pantai, (13) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelabuhan Perikanan Pantai, (14) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan, (15) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Budidaya Ikan Air Tawar, (16) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Budidaya Ikan Pantai, dan (17) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Pelabuhan Perikanan Pantai, dengan realisasi fisik sebesar 99,74% dan realisasi keuangan sebesar 89,53%, Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten melaksanakan 9 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, (5) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, (6) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliman – Cisawarna, (7) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Ciujung – Cidanau, (8) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciujung – Cidanau, dan (9) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cidurian – Cisadane, dengan realisasi fisik sebesar 94,04% dan realisasi keuangan sebesar 77,60%, Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten melaksanakan 22 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, (5) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, (6) Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi, (7) Kegiatan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis, (8) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang, (9) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana

Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Serang dan Cilegon, (10) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pembinaan Jasa Konstruksi, (11) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang, (12) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Serang dan Cilegon, (13) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pembinaan Jasa Konstruksi, (14) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang, (15) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Serang dan Cilegon, (16) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pembinaan Jasa Konstruksi, (17) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Pandeglang, (18) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Lebak, (19) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Pandeglang, (20) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Lebak, (21) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Pandeglang, dan (22) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Lebak, dengan realisasi fisik sebesar 91,38% dan realisasi keuangan sebesar 90,98%, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah melaksanakan 39 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, (5) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, (6) Kegiatan Penataan Arsip di DPPKD Provinsi Banten, (7) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Balaraja, (8) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Balaraja, (9) Kegiatan Penyediaan Barang dan

Jasa Perkantoran pada UPT DPPKD Balaraja, (10) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Cikande, (11) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Cikande, (12) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT DPPKD Cikande, (13) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Cikokol, (14) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Cikokol, (15) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT DPPKD Cikokol, (16) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Ciledug, (17) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Ciledug, (18) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT DPPKD Ciledug, (19) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Cilegon, (20) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Cilegon, (21) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT DPPKD Cilegon, (22) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Ciputat, (23) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Ciputat, (24) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT DPPKD Ciputat, (25) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Malingping, (26) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Malingping, (27) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT DPPKD Malingping, (28) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Pandeglang, (29) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Pandeglang, (30) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT DPPKD Pandeglang, (31) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Rangkasbitung, (32) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Rangkasbitung, (33) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT DPPKD Rangkasbitung, (34) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Serang, (35) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Serang, (36) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada UPT DPPKD Serang, (37) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Serpong, (38) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Serpong, dan (39) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT DPPKD Serpong, dengan realisasi fisik sebesar 88,60% dan realisasi keuangan sebesar 85,21%. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten melaksanakan 15 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, (5) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, (6) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan, (7) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan, (8) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Tahura, (9) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan, (10) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan, (11) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Tahura, (12) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan, (13) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan, (14) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Tahura, dan (15) Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai Proteksi Tanaman Perkebunan dan Penyediaan Sarana Pendukung (DAK) , dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 93,20%. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika melaksanakan 15 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, (5) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, (6) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT

Serang, (7) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Tangerang, (8) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Serang, (9) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Tangerang, (10) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Serang, (11) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Tangerang, (12) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Tangerang Selatan, (13) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Lebak-Pandeglang, (14) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Lebak-Pandeglang, dan (15) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Tangerang Selatan, dengan realisasi fisik sebesar 97,23% dan realisasi keuangan sebesar 87,39%. Dinas Pertambangan dan Energi melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan (5) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 80,89%. Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan 11 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, (5) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, (6) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana pada Balai Pengelola Laboratorium Metrologi, (7) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana pada Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri, (8) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengelola Laboratorium Metrologi, (9) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri, (10) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelola Laboratorium Metrologi, dan (11) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri, dengan realisasi fisik sebesar 97,62% dan realisasi keuangan sebesar

91,35%. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan 9 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, (5) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, (6) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Banten, (7) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Banten, (8) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa pada UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Banten, dan (9) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Banten, dengan realisasi fisik sebesar 90,67% dan realisasi keuangan sebesar 87,92%. Dinas Sosial Provinsi Banten melaksanakan 13 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, (5) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, (6) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perlindungan Sosial, (7) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial, (8) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perlindungan Sosial, (9) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial, (10) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Perlindungan Sosial, (11) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial, (12) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada Balai Perlindungan Sosial, dan (13) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial, dengan realisasi fisik sebesar 99,45% dan realisasi keuangan sebesar 97,39%. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan 8 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3) Kegiatan Penyediaan Barang dan

Jasa Perkantoran, (4) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, (5) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, (6) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Latihan Kerja Industri, (7) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Latihan Kerja Industri, dan (8) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Latihan Kerja Industri, dengan realisasi fisik sebesar 98,03% dan realisasi keuangan sebesar 80,37%. Dinas Koperasi dan UMKM melaksanakan 8 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, (5) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah, (6) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balatkop, (7) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balatkop, dan (8) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balatkop, dengan realisasi fisik sebesar 99,38% dan realisasi keuangan sebesar 91,62%. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten melaksanakan 6 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, (5) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, dan (6) Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan, dengan realisasi fisik sebesar 99,21% dan realisasi keuangan sebesar 91,27%. Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten melaksanakan 9 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, (5) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, (6) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Lab, (7) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Lab, (8) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur pada UPT Lab, dan (9) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada UPT Lab, dengan realisasi fisik sebesar 88,03% dan realisasi



keuangan sebesar 69,82%. Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan (5) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, dengan realisasi fisik sebesar 99,00% dan realisasi keuangan sebesar 82,99%. Badan Pendidikan dan Pelatihan melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan (5) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, dengan realisasi fisik sebesar 98,88% dan realisasi keuangan sebesar 94,27%. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan (5) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, dengan realisasi fisik sebesar 96,49% dan realisasi keuangan sebesar 95,84%. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan (5) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 90,85%. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan (5) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, dengan realisasi fisik sebesar 92,27% dan realisasi keuangan sebesar 80,48%. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan 4 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2)

Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, dan (4) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,55%. Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan (5) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 93,38%. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan (5) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 95,07%. Kantor Penghubung melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan (5) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, dengan realisasi fisik sebesar 91,26% dan realisasi keuangan sebesar 83,99%. RSUD Malingping melaksanakan 4 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, dan (4) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, dengan realisasi fisik sebesar 92,03% dan realisasi keuangan sebesar 83,57%. Sekretariat Komisi Penyiaran Informasi Daerah melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan (5) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah,

dengan realisasi fisik sebesar 96,00% dan realisasi keuangan sebesar 88,03%. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan (5) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 79,51%. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Banten melaksanakan 6 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, (2) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, (3) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (4) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, (5) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, dan (6) Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia RSUD Banten, dengan realisasi fisik sebesar 76,03% dan realisasi keuangan sebesar 63,34%. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 94,34% dan realisasi keuangan sebesar 82,20%.

11) Program Pembinaan, Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur.

Program ini dilaksanakan oleh Kantor Inspektorat Provinsi Banten melaksanakan 8 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan, (2) Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan, (3) Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan, (4) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan yang Lebih Komprehensif, (5) Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala, (6) Kegiatan Penanganan Kasus-Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah, (7) Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH, dan (8) Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 97,56% dan realisasi keuangan sebesar 93,25%.

12) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Banten dengan melaksanakan 9 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Fasilitasi

Pengkajian Produk Hukum, (2) Kegiatan Fasilitasi Penyusunan, Persetujuan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD Provinsi Banten, (3) Kegiatan Pelayanan Informasi Hukum dan Perpustakaan DPRD Provinsi Banten, (4) Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Tata Kelola Administrasi Pimpinan DPRD Provinsi Banten, (5) Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Alat Kelengkapan DPRD, (6) Kegiatan Fasilitasi Risalah DPRD Provinsi Banten, (7) Kegiatan Fasilitasi Protokoler DPRD Provinsi Banten, (8) Kegiatan Fasilitasi Informasi dan Publikasi DPRD Provinsi Banten, dan (9) Kegiatan Fasilitasi Aspirasi Masyarakat. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 73,02%.

13) Program Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Produk Hukum dan HAM.

Program ini dilaksanakan oleh Biro Hukum Provinsi Banten dengan melaksanakan 10 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, (2) Kegiatan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Banten, (3) Kegiatan Penyusunan Keputusan Kepala Daerah Provinsi Banten, (4) Kegiatan Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota Wilayah I, (5) Kegiatan Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota Wilayah II, (6) Kegiatan Penyusunan Kajian Produk Hukum dan Penyusunan MoU/Perjanjian, (7) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum, (8) Kegiatan Peningkatan Perlindungan Hukum dan HAM, (9) Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Hukum Masyarakat/Kadarkum, dan (10) Kegiatan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 97,11% dan realisasi keuangan sebesar 92,45%.

14) Program Penelitian, Pengembangan Kebijakan Strategis Daerah dan IPTEK.

Program ini dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten dengan melaksanakan 8 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan, (2) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Politik Hukum dan

HAM, (3) Kegiatan Pengembangan dan Penerapan Hasil Penelitian Bidang Sosial Budaya, (4) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Kemasyarakatan, (5) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Teknologi Tepat Guna, (6) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Pembangunan, (7) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pengembangan Kawasan, dan (8) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Ruang. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 95,70%.

#### 20. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pada Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didukung oleh 1 Program yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp7.428.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp6.537.746.890,00 atau sebesar 88,01% dengan realisasi fisik sebesar 94,67%, pelaksanaan program dimaksud adalah Program Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Perdesaan.

Program ini melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM), (2) Kegiatan Pengembangan dan Pembangunan Partisipatif Pemberdayaan Masyarakat, (3) Kegiatan Penumbuhkembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Lembaga Keuangan Mikro Pedesaan, (4) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam Perkembangan Desa/Kelurahan, dan (5) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan dan Pengendalian Pembangunan Desa. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 94,67% dan realisasi keuangan sebesar 88,01%.

#### 21. Urusan Wajib Sosial.

Pada Urusan Wajib Bidang Sosial didukung oleh 4 program dan 19 kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten, Dinas Sosial Provinsi Banten, dan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Sosial sebesar Rp79.127.909.900,00 dan realisasi sebesar Rp76.055.856.420,00 atau

sebesar 96,12% dengan realisasi fisik sebesar 99,97%, pelaksanaan program dimaksud adalah:

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin.

Program ini dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten, dan Dinas Sosial Provinsi Banten yang terbagi atas 4 kegiatan, yaitu: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten melaksanakan 1 kegiatan, yaitu: Kegiatan Penguatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 94,57%, dan Dinas Sosial Provinsi Banten melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Sosial Fakir Miskin, (2) Kegiatan Peningkatan dan Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan, dan (3) Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Sosial Komunitas Masyarakat Terpendek, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,16%. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,05%.

2. Program Rehabilitasi Sosial.

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Banten dengan melaksanakan 7 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Perlindungan Sosial Anak dan Lanjut Usia, (2) Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial dan Eks Napza, (3) Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Orang dengan Kecacatan dan Eks Penyakit Kronis, (4) Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Sosial pada Balai Perlindungan Sosial, (5) Kegiatan Fasilitasi Penerimaan dan Penyaluran pada Balai Perlindungan Sosial, (6) Kegiatan Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial (BP2S), dan (7) Kegiatan Penerimaan dan Penyaluran pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial (BP2S). Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 99,86% dan realisasi keuangan sebesar 97,90%.

3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Banten dengan melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Perlindungan Sosial

KTK dan Pekerja Migran Bermasalah, (2) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana, dan (3) Kegiatan Pendayagunaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,19%.

#### 4. Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan.

Program ini dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten, dan Dinas Sosial Provinsi Banten yang terbagi atas 5 kegiatan, yaitu: Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten melaksanakan 2 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Kehidupan Keagamaan, dan (2) Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Pembinaan Lembaga Keagamaan, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 91,72%, dan Dinas Sosial Provinsi Banten melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Peningkatan Kualitas Potensi dan Sumber Kesos Masyarakat, (2) Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan (NK3), dan (3) Kegiatan Promosi, Publikasi dan Penyuluhan Kesejahteraan Sosial, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,42%. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 93,05%.

#### 22. Urusan Wajib Kebudayaan.

Pada Urusan Wajib Bidang Kebudayaan didukung oleh 1 program dan 5 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Kebudayaan sebesar Rp11.618.669.000,00 dan realisasi sebesar Rp8.820.388.047,00 atau sebesar 75,92% dengan realisasi fisik sebesar 91,80%, pelaksanaan program dimaksud adalah Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya.

Program ini melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pembinaan Kesenian Daerah, (2) Kegiatan Fasilitasi dan Pagelaran Seni, (3) Kegiatan Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah, (4) Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya Museum dan Kesejarahan, dan (5)

Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Cagar Budaya, Museum dan Kesenjaraan. Realisasi fisik kegiatan kumulatif pada program dimaksud sebesar 91,80% dan realisasi keuangan sebesar 75,92%.

### 23. Urusan Wajib Statistik.

Pada Urusan Wajib Bidang Statistik didukung oleh 1 program dan 42 kegiatan yang dilaksanakan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Provinsi Banten (42 SKPD). Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Statistik sebesar Rp27.860.760.013,00 dan realisasi sebesar Rp25.512.296.738,00 atau sebesar 91,57% dengan realisasi fisik sebesar 96,60%, pelaksanaan program dimaksud adalah yaitu: Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah.

Pelaksanaan program dimaksud terbagi atas 42 kegiatan dengan nama kegiatan yang sama, yaitu: Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan. Adapun realisasi yang dicapai pada masing-masing SKPD dilingkungan Provinsi Banten, adalah: Dinas Pendidikan dengan realisasi fisik sebesar 84,84% dan realisasi keuangan sebesar 84,84%, Dinas Kesehatan Provinsi Banten dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 93,55%, RSUD Malingping dengan realisasi fisik sebesar 87,49% dan realisasi keuangan sebesar 92,53%, RSUD Banten dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 70,74%, Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,83%, Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten dengan realisasi fisik sebesar 89,44% dan realisasi keuangan sebesar 89,44%, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 91,95%, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 91,48%, Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 91,72%, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,20%, Dinas Sosial Provinsi Banten dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,38%, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan realisasi fisik sebesar 100% dan



realisasi keuangan sebesar 96,97%, Dinas Koperasi dan UMKM dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,48%, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 94,21%, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 93,61%, Dinas Pemuda dan Olahraga dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,27%, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,75%, Sekretariat DPRD dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,20%, Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten dengan realisasi fisik sebesar 93,08% dan realisasi keuangan sebesar 86,53%, Biro Hukum dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,82%, Biro Organisasi dengan realisasi fisik sebesar 98,84% dan realisasi keuangan sebesar 98,84%, Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,03%, Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 86,02%, Biro Umum dengan realisasi fisik sebesar 78,15% dan realisasi keuangan sebesar 78,15%, Biro Perlengkapan dan Aset Daerah dengan realisasi fisik sebesar 97,28% dan realisasi keuangan sebesar 90,80%, Biro Humas dan Protokol dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 95,14%, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan realisasi fisik sebesar 82,55% dan realisasi keuangan sebesar 82,55%, Kantor Inspektorat dengan realisasi fisik sebesar 90,82% dan realisasi keuangan sebesar 76,39%, Badan Kepegawaian Daerah dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,82%, Badan Pendidikan dan Pelatihan dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 81,58%, Satuan Polisi Pamong Praja dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,51%, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,95%, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,45%, Kantor Penghubung dengan realisasi fisik sebesar

83,95% dan realisasi keuangan sebesar 83,95%, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dengan realisasi fisik sebesar 98,86% dan realisasi keuangan sebesar 84,14%, Sekretariat Komisi Penyiaran Informasi Daerah dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 86,62%, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah dengan realisasi fisik sebesar 99,34% dan realisasi keuangan sebesar 99,34%, Dinas Pertanian dan Peternakan dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 93,16%, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten dengan realisasi fisik sebesar 87,80% dan realisasi keuangan sebesar 87,80%, Dinas Pertambangan dan Energi dengan realisasi fisik sebesar 81,58% dan realisasi keuangan sebesar 63,44%, Dinas Kelautan dan Perikanan dengan realisasi fisik sebesar 100% realisasi keuangan sebesar 75,79%, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,25%. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 96,60% dan realisasi keuangan sebesar 91,57%.

#### 24. Urusan Wajib Kearsipan.

Pada Urusan Wajib Bidang Kearsipan didukung oleh 1 program dan 4 kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Kearsipan sebesar Rp8.283.291.900,00 dan realisasi sebesar Rp7.239.499.604,00 atau sebesar 87,40% dengan realisasi fisik sebesar 89,15%, pelaksanaan program dimaksud adalah yaitu Program Pembinaan Kearsipan Daerah.

Program ini melaksanakan 4 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Penataan, Pemeliharaan dan Pelestarian Arsip Daerah, (2) Kegiatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kearsipan Provinsi Banten (SIKP), (3) Kegiatan Pembinaan Aparatur Pengelola Kearsipan Daerah Provinsi Banten, dan (4) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kearsipan Daerah. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 89,15% dan realisasi keuangan sebesar 87,40%.

#### 25. Urusan Wajib Perpustakaan.

Pada Urusan Wajib Bidang Perpustakaan didukung oleh 2 Program dan 6 kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada

Urusan Wajib Bidang Perpustakaan sebesar Rp5.883.452.500,00 dan realisasi sebesar Rp5.368.847.278,00 atau sebesar 91,25% dengan realisasi fisik sebesar 94,70%, pelaksanaan program dimaksud adalah:

1) Program Pengembangan Minat dan Budaya Baca.

Program ini melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Peningkatan Kualitas Layanan dan Kerjasama Perpustakaan, (2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Minat dan Budaya Baca Masyarakat, dan (3) Kegiatan Pengembangan Layanan dan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Teknologi dan Informatika. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 95,40% dan realisasi keuangan sebesar 89,05%.

2) Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan.

Program ini melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Perpustakaan, (2) Kegiatan Pengelolaan Bahan Deposit, Otomasi Karya Cetak/Rekam dan Naskah Kuno Tentang Banten, dan (3) Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan. Realisasi fisik pada program dimaksud sebesar 93,99% dan realisasi keuangan sebesar 92,91%.

### 2.1.2 Penyelenggaraan Urusan Pilihan

Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Pilihan Bidang sebesar Rp187.103.359.600,00 dan realisasi sebesar Rp164.796.661.905,00 atau sebesar 88,08% dengan realisasi fisik sebesar 97,77%. Adapun Urusan Pilihan Bidang yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan.

Pada Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan didukung oleh 1 program dan 4 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan sebesar Rp2.500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.319.809.291,00 atau sebesar 92,79% dengan realisasi fisik sebesar 100%, pelaksanaan program dimaksud adalah Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Program ini melaksanakan 4 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut, (2) Kegiatan Pengendalian Sumberdaya Kelautan, (3) Kegiatan Pengendalian Sumberdaya Perikanan, dan (4) Kegiatan Penanganan Pelanggaran Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 92,79%.

## 2. Urusan Pilihan Pertanian

Pada Urusan Pilihan Bidang Pertanian didukung oleh 4 program dan 57 kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten, Dinas Pertanian dan Peternakan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Pilihan Bidang Pertanian sebesar Rp82.547.992.600,00 dan realisasi sebesar Rp68.705.600.413,00 atau sebesar 83,23% dengan realisasi fisik sebesar 97,11%, pelaksanaan program dimaksud adalah:

### 1) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan.

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Pertanian dan Peternakan yang terbagi atas 34 kegiatan, antara lain: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Peningkatan Daya Dukung Pembangunan Perkebunan, (2) Kegiatan Pengembangan dan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan, (3) Kegiatan Perlindungan Tanaman Perkebunan, (4) Kegiatan Peningkatan Proteksi dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman, dan (5) Kegiatan Pengembangan Benih Unggul Bermutu, dengan realisasi fisik sebesar 98,92% dan realisasi keuangan sebesar 90,00%, Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan 13 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Laut, (2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Payau, (3) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Tawar, (4) Kegiatan Pembinaan Perbenihan Ikan Air Tawar (BBAT), (5) Kegiatan Pengembangan Benih dan Induk Ikan Unggul Air Tawar (BBAT), (6) Kegiatan Pengembangan Benih dan Induk Ikan Unggul Air Laut (BBIP), (7) Kegiatan Pembinaan

Perbenihan Ikan Air Laut (BBIP), (8) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pelabuhan dan Armada Perikanan, (9) Kegiatan Peningkatan Produktifitas Perikanan Tangkap, (10) Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Kepelabuhanan Perikanan Labuan, (11) Kegiatan Pengembangan dan Pendayagunaan Pelabuhan Perikanan (BPPP Labuan), (12) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Budidaya Air Tawar (DAK), dan (13) Kegiatan Pengembangan Sarana Perikanan Tangkap (DAK), dengan realisasi fisik sebesar 98,15% dan realisasi keuangan sebesar 79,81%, dan Dinas Pertanian dan Peternakan melaksanakan 16 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Sereal, (2) Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Aneka Kacang dan Umbi (Akabi), (3) Kegiatan Pengendalian Mutu Benih Tanaman Hortikultura, (4) Kegiatan Peningkatan Sistem Pengendalian OPT Tanaman Pangan, (5) Kegiatan Pengendalian Mutu Benih Tanaman Pangan, (6) Kegiatan Pengembangan Varietas Tanaman Pangan dan Hortikultura, (7) Kegiatan Pengembangan Ternak Besar, Kecil dan Unggas, (8) Kegiatan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular, (9) Kegiatan Pengembangan Produksi dan Pemanfaatan Benih/Bibit Unggul, (10) Kegiatan Pengembangan Perbibitan Ternak Ruminansia, (11) Kegiatan Pengembangan Perbibitan Ternak Non Ruminansia, (12) Kegiatan Peningkatan Penyidikan, Pengujian dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular, (13) Kegiatan Peningkatan Penyidikan, Pengujian dan Pelayanan Masyarakat Veteriner (Kesmavet), (14) Kegiatan Peningkatan Produksi dan Pengembangan Komoditas Tanaman Buah dan Biofarmaka, (15) Kegiatan Peningkatan Produksi dan Pengembangan Komoditas Tanaman Hias dan Sayuran, dan (16) Kegiatan Peningkatan Sistem Pengendalian OPT Hortikultura, dengan realisasi fisik sebesar 99,49% dan realisasi keuangan sebesar 84,18%. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 99,57% dan realisasi keuangan sebesar 83,52%.

2) Program Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan.

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten, Dinas Pertanian dan Peternakan, dan Dinas

Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten yang terbagi atas 16 kegiatan, antara lain: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dan Kebun, (2) Kegiatan Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan dan Perkebunan, (3) Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan dan Kebun, (4) Kegiatan Pembinaan Pengujian Hasil Hutan, dan (5) Kegiatan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 88,38%, Dinas Pertanian dan Peternakan melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, (2) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Sistem Pertanian Terpadu, (3) Kegiatan Penyediaan Teknologi, Perlindungan dan Pasca Panen Tanaman Pangan, (4) Kegiatan Penyediaan Teknologi, Perlindungan dan Pasca Panen Tanaman Hortikultura, dan (5) Kegiatan Penyediaan Teknologi Pasca Panen Peternakan, dengan realisasi fisik sebesar 99,38% dan realisasi keuangan sebesar 91,02%, dan Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan 6 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan, (2) Kegiatan Diversifikasi Produk Hasil Perikanan, (3) Kegiatan Pengembangan Bisnis dan Investasi, (4) Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan (DAK), (5) Kegiatan Pengelolaan Kompetensi dan Pelayanan Pengujian UPTD BPMHP Banten, dan (6) Kegiatan Pengendalian Mutu dan Perekrayasaan Olahan Hasil Perikanan (BPMHP), dengan realisasi fisik sebesar 99,59% dan realisasi keuangan sebesar 68,20%. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 99,66% dan realisasi keuangan sebesar 81,36%.

3) Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan.

Program ini dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten, dan Dinas Pertanian dan Peternakan yang terbagi atas 6 kegiatan, yaitu: Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan melaksanakan 2 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dan (2) Kegiatan

Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dengan realisasi fisik sebesar 96,61% dan realisasi keuangan sebesar 87,08%, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Tani, (2) Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan dan Penerapan Teknologi Kehutanan dan Perkebunan, dan (3) Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Kehutanan dan Perkebunan, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 93,80%, dan Dinas Pertanian dan Peternakan melaksanakan 1 kegiatan, yaitu: Kegiatan Pemberdayaan Petani dan Kelembagaan Pertanian, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 88,33%. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 98,87% dan realisasi keuangan sebesar 88,30%.

#### 4) Program Peningkatan Daya Dukung Sumberdaya Pertanian.

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten dengan melaksanakan 1 kegiatan, yaitu: Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Sarana Produksi Pertanian. Realisasi fisik pada program dimaksud sebesar 90,32% dan realisasi keuangan sebesar 67,42%.

### 3. Urusan Pilihan Kehutanan.

Pada Urusan Pilihan Bidang Kehutanan didukung oleh 1 program dan 3 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Pilihan Bidang Kehutanan sebesar Rp3.650.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.280.965.084,00 atau sebesar 89,89% dengan realisasi fisik sebesar 100%, pelaksanaan program dimaksud adalah Program Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya Hutan dan Lahan.

Program ini melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan, (2) Kegiatan Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Hutan, dan (3) Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Tahura Banten. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 89,89%.

### 4. Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pada Urusan Pilihan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral didukung oleh 3 program dan 21 kegiatan yang dilaksanakan oleh

Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Pilihan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp58.146.901.000,00 dan realisasi sebesar Rp55.119.730.370,00 atau sebesar 94,79% dengan realisasi fisik sebesar 100%, pelaksanaan program dimaksud adalah:

1) Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi.

Program ini melaksanakan 11 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pembangunan Listrik Perdesaan di WKP III (Kabupaten Lebak) , (2) Kegiatan Pembangunan Listrik Perdesaan di WKP III (Kabupaten Pandeglang), (3) Kegiatan Pembangunan Listrik Perdesaan di WKP II (Kabupaten/Kota Serang dan Kota Cilegon), (4) Kegiatan Pembangunan Listrik Perdesaan di WKP I (Kabupaten Tangerang), (5) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Listrik Perdesaan, (6) Kegiatan Pengawasan Pembangunan Listrik Perdesaan, (7) Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Ketenagalistrikan di Provinsi Banten, (8) Kegiatan Peningkatan Penerapan dan Pemanfaatan Energi Terbarukan di Provinsi Banten, (9) Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Penerapan dan Pemanfaatan Energi Terbarukan di Provinsi Banten, (10) Kegiatan Pengembangan Potensi dan Pembinaan Perusahaan MIGAS, dan (11) Kegiatan Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan di Provinsi Banten. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 94,42%.

2) Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi.

Program ini melaksanakan 7 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Teknik Pertambangan, (2) Kegiatan Pemetaan dan Perencanaan Teknis Pengembangan Potensi Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi di Provinsi Banten, (3) Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Bidang Pertambangan, (4) Kegiatan Pemantauan dan Konservasi Potensi Air Tanah di Provinsi Banten, (5) Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Potensi Air Tanah di Provinsi Banten, (6) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Data Mitigasi Geologi, dan (7) Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Air Tanah di Provinsi Banten. Realisasi



fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,45%.

3) Program Pengembangan, Pengusahaan Potensi dan Produk Pertambangan dan Energi.

Program ini melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Pembinaan Bidang Pertambangan dan Energi, (2) Kegiatan Promosi Potensi dan Produk serta Fasilitasi Kerjasama Bidang Pertambangan dan Energi, dan (3) Kegiatan Publikasi Data dan Informasi Bidang Pertambangan dan Energi. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,61%.

5. Urusan Pilihan Pariwisata.

Pada Urusan Pilihan Bidang Pariwisata didukung oleh 2 Program dan 10 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Pilihan Bidang Pariwisata sebesar Rp20.625.345.000,00 dan realisasi sebesar Rp17.559.093.969,00 atau sebesar 85,13% dengan realisasi fisik sebesar 90,70%, pelaksanaan program dimaksud adalah:

1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata.

Program ini melaksanakan 7 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pengelolaan Destinasi Wisata, (2) Kegiatan Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, (3) Kegiatan Pengembangan Standarisasi Pariwisata, (4) Kegiatan Analisa Pasar Pariwisata, (5) Kegiatan Promosi Pariwisata dan Budaya Banten, (6) Kegiatan Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi, dan (7) Kegiatan Fasilitasi Sekretariat Dewan Kawasan KEK. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 87,07% dan realisasi keuangan sebesar 83,59%.

2) Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisata.

Program ini melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pengembangan Kemitraan Budaya dan Pariwisata, (2) Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pariwisata, dan (3) Kegiatan Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 94,33% dan realisasi keuangan sebesar 91,61%.

6. Urusan Pilihan Industri.

Pada Urusan Pilihan Bidang Industri didukung oleh 1 program dan 8 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Pilihan Bidang Industri sebesar Rp5.967.142.500,00 dan realisasi sebesar Rp5.349.694.048,00 atau sebesar 89,65% dengan realisasi fisik sebesar 100%, pelaksanaan program dimaksud adalah Program Peningkatan Daya Saing Industri.

Program ini melaksanakan 8 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Dukungan Pengembangan Industri Transportasi dan Telematika, (2) Kegiatan Dukungan Pengembangan Industri TPT dan Aneka, (3) Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Mutu dan Kualitas Aneka Produk IKM, (4) Kegiatan Standarisasi dan Sertifikasi Industri, (5) Kegiatan Pengembangan Desain dan Diverifikasi Komoditas Kerajinan Berbasis Budaya Daerah, (6) Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Produk dan Keamanan Pangan Spesifik Daerah, (7) Kegiatan Pengembangan sektor IKM Kimia Provinsi Banten, dan (8) Kegiatan Peningkatan Dukungan Bagi Pembentukan dan Pengembangan Klaster Industri Mesin. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 89,65%.

7. Urusan Pilihan Perdagangan.

Pada Urusan Pilihan Bidang Perdagangan didukung oleh 1 program dan 8 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Pilihan Bidang Perdagangan sebesar Rp10.965.849.500,00 dan realisasi sebesar Rp10.023.651.200,00 atau sebesar 91,41% dengan realisasi fisik sebesar 100%, pelaksanaan program dimaksud adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan.

Program ini melaksanakan 8 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pengawasan Barang Jasa Beredar dan Kebutuhan Pokok Masyarakat, (2) Kegiatan Peningkatan Peran Pelaku Usaha dalam Kerjasama Perdagangan, (3) Kegiatan Peningkatan Akses Distribusi dan Bina Sarana Pasar bagi Komoditas Andalan Daerah, (4) Kegiatan Peningkatan Promosi dan Pemanfaatan Kerjasama Perdagangan Luar Negeri, (5) Kegiatan Peningkatan Peran dan Fasilitasi Dunia Usaha Bagi Pengembangan

Ekspor Daerah, (6) Kegiatan Pengembangan Sentra Pemasaran dan Lelang Produk Andalan Daerah, (7) Kegiatan Pelayanan Tera dan Tera Ulang, dan (8) Kegiatan Penerapan Teknologi Aplikasi dan Kalibrasi Alat Ukur. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 91,41%.

8. Urusan Pilihan Ketransmigrasian.

Pada Urusan Pilihan Bidang Ketransmigrasian didukung oleh 1 program dan 3 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Pilihan Bidang Ketransmigrasian sebesar Rp2.700.129.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.438.117.530,00 atau sebesar 90,30% dengan realisasi fisik sebesar 94,36%, pelaksanaan program dimaksud adalah Program Penyiapan, Pengerahan dan Pembinaan Transmigrasi.

Program ini melaksanakan 3 kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pengerahan dan Penyiapan Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi, (2) Kegiatan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi, dan (3) Kegiatan Pembinaan Pasca Penempatan Transmigrasi. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 94,36% dan realisasi keuangan sebesar 90,30%.

2.1.3 Capaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan dan Program

Capaian Indikator Makro Pembangunan Tahun 2013-2015 meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) , Persentase Penduduk Miskin, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) bila dibandingkan dengan angka target kinerja RPJMD pada Tahun 2015 digambarkan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.1  
Capaian Indikator Makro Pembangunan Tahun 2015

| Uraian Indikator Makro Pembangunan | 2013         |           | 2014         |           | 2015         |           |
|------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
|                                    | Target RPJMD | Realisasi | Target RPJMD | Realisasi | Target RPJMD | Realisasi |
| 1. I P M                           | 73,47        | 71,87     | 74,02        | 69,89     | 74,57        |           |
| 2. L P E                           | 6,5 - 6,7%   | 5,86%     | 6,6-6,8%     | 5,47%     | 6,7-6,8%     | 4,79      |

|                                   |          |       |          |       |          |         |
|-----------------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|---------|
| 3.Persentase Penduduk Miskin      | 5,5-5,2% | 5,89% | 5,3-5,0% | 5,51% | 5,1-4,8% | 5,75    |
| 4.Persentase Pengangguran Terbuka | 10,24%   | 9,90% | 9,74%    | 9,07% | 9,24%    | 9,55 *) |

Sumber : LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2015

Sub Bab ini juga menjelaskan realisasi capaian indikator kinerja pada setiap program yang diukur/dievaluasi capaiannya pada 78 program 245 indikator kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja, terdapat 15 program yang capaian indikatornya masih kurang dari 80% yang tersebar pada 29 indikator kinerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.2  
Capaian Indikator Kinerja Per Program  
Pada Penyelenggaraan Urusan Wajib Tahun 2015

| No | Program   | Indikator Kinerja   | Target | Realisasi | Capaian (%) | SKPD   |
|----|---|---|--------|-----------|-------------|--------|
| 1  | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  | Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%)  | 47,00  | 46,64     | 99,23       | Dindik |
| 2  | Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun  | APM Jenjang SD/SDLB/MI/Paket A  | 99,48  | 99,58     | 100,10      | Dindik |
|    |   | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B/Wustho  | 99,54  | 100,67    | 101,14      | Dindik |
| 3  | Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun  | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/SMA-LB/MA/Paket C   | 63,52  | 66,83     | 105,21      | Dindik |
| 4  | Peningkatan mutu, kesejahteraan dan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Rasio jumlah guru yang memenuhi kualifikasi minimum S.1 / D.IV terhadap jumlah guru keseluruhan (%) | 2,38   | 16,90     | 709,36      | Dindik |
| 5  | Pendidikan  | Angka Partisipasi Kasar (APK) PT/PTA  | 7,03   | 15,56     | 221,34      | Dindik |

| No | Program  | Indikator Kinerja  | Target       | Realisasi    | Capaian (%) | SKPD   |
|----|--|--|--------------|--------------|-------------|--------|
|    | Tinggi   | (%)  |              |              |             |        |
|    |  | Jumlah Prodi yang terakreditasi (unit)   | 5 Unit       | 5 Unit       | 100,00      | Dindik |
| 6  | Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFi)              | Angka Buta Aksara Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (orang)                              | 12.500 Orang | 15.400 Orang | 123,20      | Dindik |
| 7  | Peningkatan Mutu Tata Kelola dan Pencitraan Pendidikan | Rata -rata Lama Sekolah (tahun)  | 9,29         | 8,19         | 88,16       | Dindik |
|    |  | Ketersediaan Sarana Prasarana SMAN CMBBS (%)   | 10,00        | 10,00        | 100,00      | Dindik |
| 8  | Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak                   | Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) (%)                                 | 78,00        | 73,30        | 93,97       | Dinkes |
|    |  | Persentase Ibu bersalin yg ditolong oleh Nakes terlatih (Cakupan PN) (%)             | 91,00        | 84,43        | 92,78       | Dinkes |
|    |  | Cakupan Kunjungan Neonatal pertama (KN1) (%)   | 91,50        | 91,90        | 100,44      | Dinkes |
| 9  | Pembinaan Upaya Kesehatan                              | Persentase Rumah Tangga Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) (%)          | 72,00        | 72,00        | 100,00      | Dinkes |
|    |  | Persentase RSUD dan Swasta yang melayani pasien penduduk miskin (%)                  | 92,00        | 92,00        | 100,00      | Dinkes |
|    |  | Persentase RS yg melaksanakan PONEK (%)  | 100,00       | 100,00       | 100,00      | Dinkes |
|    |  | Persentase Peningkatan Sarana dan Prasana RS Provinsi & Labkesda Provinsi Banten (%) | 90,00        | 90,00        | 100,00      | Dinkes |
|    |  | Persentase Puskesmas Rawat Inap Yang Mampu PONED                                     | 100,00       | 100,00       | 100,00      | Dinkes |

| No | Program   | Indikator Kinerja  | Target | Realisasi | Capaian (%) | SKPD        |
|----|---|--|--------|-----------|-------------|-------------|
|    |   | Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Medis RSUD Banten (%)   | 70,00  | 70,00     | 100,00      | RSUD Banten |
|    |   | Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Non Medis RSUD Banten (%)   | 70,00  | 70,00     | 100,00      | RSUD Banten |
|    |   | Pasien yang dilayani dan ditangani sesuai dengan indikasi dan kemampuan (%)  | 80,00  | 80,00     | 100,00      | RSUD Banten |
|    |   | Waktu keberlangsungan pelayanan terpenuhi di semua bagian (%)  | 80,00  | 80,00     | 100,00      | RSUD Banten |
|    |   | Pasien yang mendapatkan asuhan keperawatan (%)   | 100,00 | 100,00    | 100,00      | RSUD Banten |
|    |   | Tenaga perawat yang mendapat pembinaan dan pengembangan keperawatan (%)  | 50,00  | 50,00     | 100,00      | RSUD Banten |
| 10 | Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan | Jumlah Bayi Yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap/UCI (Universl Child Immunization) dibawah 1 tahun di Desa/Kelurahan | 100,00 | 80,00     | 80,00       | Dinkes      |
|    |   | Prevalensi HIV (%)   | <0,5   | 0,48      | 96,00       | Dinkes      |
|    |   | Persentase kasus baru Tuberkulosis Paru (BTA positif) yang disembuhkan (%)   | 91,00  | 52,00     | 57,14       | Dinkes      |
|    |   | Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk  | ≤1     | 0,001     | 0,10        | Dinkes      |
|    |   | Presentasi puskesmas yang melaksanakan program pengendalian  | 40,00  | 100,00    | 250,00      | Dinkes      |

| No | Program  | Indikator Kinerja  | Target   | Realisasi | Capaian (%) | SKPD            |
|----|--|--|----------|-----------|-------------|-----------------|
|    |  | Penyakit Tidak Menular (%)   |          |           |             |                 |
|    |  | Persentase cakupan penduduk yang terakses air minum berkualitas (%)  | 77,00    | 60,20     | 78,18       | Dinkes          |
| 11 | Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan                       | Persentase ketersediaan obat buffer di Provinsi Banten (%)   | 100,00   | 100,00    | 100,00      | Dinkes          |
|    |  | Persentase Sarana Kesehatan, Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang berkualitas (%)                       | 60,00    | 60,00     | 100,00      | Dinkes          |
| 12 | Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan | Prosentase Institusi Pendidikan Kesehatan binaan yang terakreditasi (unit)   | 33 Unit  | 32 Unit   | 96,97       | Dinkes          |
|    |  | Terlaksananya Puskesmas yg melaksanakan SIKDA (unit)   | 153 Unit | 121 Unit  | 79,08       | Dinkes          |
|    |  | Puskesmas Yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja (Unit)   | 50 Unit  | 161 Unit  | 322,00      | Dinkes          |
|    |  | Prosentase Sarana dan prasarana Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Banten (%)  | 80,00    | 0,00      | 0,00        | Dinkes          |
|    |  | Persentase Pembinaan Dinas Kesehatan Provinsi Banten dan RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas (%) | 100,00   | 100,00    | 100,00      | Dinkes          |
|    |  | Jumlah Tenaga Kesehatan RS Malingping yang ditingkatkan kemampuannya   | 32 Orang | 29 Orang  | 90,63       | RSUD Malingping |

| No | Program   | Indikator Kinerja  | Target                  | Realisasi            | Capaian (%) | SKPD            |
|----|---|--|-------------------------|----------------------|-------------|-----------------|
|    |   | (orang)  |                         |                      |             |                 |
| 13 | Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat   | Jumlah industri formal dan informal yang mendapatkan promosi kesehatan kerja     | 200 Industri            | 200 Industri         | 100,00      | Dinkes          |
|    |   | Prosentase pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat pekerja                     | 60,00                   | 60,00                | 100,00      | Dinkes          |
|    |   | Ketersediaan Obat, Bahan dan Alat Penunjang RSUD Malingping (%)                  | 100,00                  | 75,00                | 75,00       | RSUD Malingping |
|    |   | Jumlah Pasien Mendapat Layanan Kesehatan Gratis (orang)                          | 200 Orang               | 251 Orang            | 125,50      | RSUD Malingping |
|    |   | Lengkapnya pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan (%)            | 80,00                   | 80,00                | 100,00      | RSUD Banten     |
|    |   | Tersedianya data dan informasi sesuai kebutuhan dan kemampuan (%)                | 70,00                   | 70,00                | 100,00      | RSUD Banten     |
| 14 | Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Prosentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap (%)                      | 89,00                   | 77,39                | 86,96       | BMTR            |
|    |   | Prosentase panjang jembatan provinsi dalam kondisi mantap (%)                    | 92,00                   | 87,83                | 95,47       | BMTR            |
| 15 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air    | Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Teknis (ha)                        | 10,05                   | 0,00                 | 0,00        | SDA-P           |
|    |   | Cakupan pelayanan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan banjir dan abrasi (%) | 2.534,82 Ha             | 5.190 Ha             | 204,75      | SDA-P           |
| 16 | Pengembangan dan Revitalisasi                   | Tingkat ketersediaan air bersih dan sanitasi (m <sup>3</sup> )                   | 1.826,25 m <sup>3</sup> | 3.662 m <sup>3</sup> | 200,52      | SDA-P           |



| No | Program   | Indikator Kinerja   | Target     | Realisasi  | Capaian (%) | SKPD              |
|----|---|---|------------|------------|-------------|-------------------|
|    | Infrastuktur Permukiman                         | Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman desa/ kel (lokasi)        | 112 Lokasi | 478 Lokasi | 426,79      | SDA-P             |
| 17 | Program Pembinaan dan Penataan Perumahan        | Penyelesaian Gedung KP3B  | 1 Gedung   | 0,00       | 0,00        | SDA-P             |
|    |   | Pembangunan Gedung Kantor sebanyak 15 gedung                                | 3 Gedung   | 3 Gedung   | 100,00      | SDA-P             |
|    |   | Rasio Pembinaan dan Penataan Perumahan (%)                                  | 20,00      | 19,28      | 96,40       | SDA-P             |
| 18 | Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan              | Rasio Rencana Kawasan Strategis yang Tersusun (%)                           | 3 Dokumen  | 3 Dokumen  | 100,00      | Bappeda           |
|    |   | Cakupan ketersediaan regulasi dan dokumen rencana tata ruang wilayah (dok)  | 3,83       | 4,83       | 126,11      | BMTR              |
|    |   | Peningkatan Kualitas Penataan Ruang Kota (paket)                            | 1 Paket    | 1 Paket    | 100,00      | BMTR              |
| 19 | Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah | Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan (%)   | 100,00     | 100,00     | 100,00      | Bappeda           |
| 20 | Pengendalian Pembangunan Daerah                 | Cakupan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan (%) | 100,00     | 99,86      | 99,86       | Bappeda           |
|    |   | Rasio Pelaporan Pengendalian Pelaksanaan APBD (%)                           | 100,00     | 100,00     | 100,00      | Biro Ekbang       |
| 21 | Kerjasama Pembangunan Daerah                    | Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah                                    | 3 Dokumen  | 3 Dokumen  | 100,00      | Bappeda           |
|    |   | Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri            | 100,00     | 96,67      | 96,67       | Biro Pemerintahan |

| No | Program  | Indikator Kinerja   | Target     | Realisasi  | Capaian (%) | SKPD              |
|----|--|---|------------|------------|-------------|-------------------|
| 22 | Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian | Rasio Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Perhubungan melalui penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan menjadi 100% tahun 2017 | 40,22      | 40,22      | 100,00      | Dishub kominfo    |
|    |  | Tingkat pembinaan dan pemantauan angkutan darat laut dan udara sejumlah 100% tahun 2017   | 54,06      | 54,06      | 100,00      | Dishub kominfo    |
| 23 | Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup   | Persentase kualitas air yang terpantau dan terinformasikan menurut SPM (%)  | 20,00      | 100,00     | 500,00      | BLHD              |
|    |  | Rasio tindak lanjut terhadap jumlah pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup (%)                              | 20,00      | 100,00     | 500,00      | BLHD              |
| 24 | Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup                   | Luas area rehabilitasi hutan dan lahan (ha)   | 8.000 Ha   | 12.000 Ha  | 150,00      | Dishutbun         |
|    |  | Persentase peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung (%)   | 20,00      | 20,00      | 100,00      | BLHD              |
| 25 | Penataan Administrasi Kependudukan   | Cakupan Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan (%)   | 100,00     | 100,00     | 100,00      | Biro Pemerintahan |
| 26 | Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                    | Pengembangan Kota Layak Anak Kab/Kota (Forum Kader, POKJANAL)   | 2 Kab/Kota | 2 Kab/Kota | 100,00      | BPPMD             |
|    |  | Rasio Pembinaan dan Pengembangan Jaringan kerja lembaga masyarakat (TP. PKK Prov, Kab/Kota, Kec, HARGANAS) (%)                                | 100,00     | 100,00     | 100,00      | BPPMD             |
|    |  | Rasio Peningkatan Kapasitas Pengelola P2TP2A dan lembaga  | 20,00      | 20,00      | 100,00      | BPPMD             |

| No | Program                             | Indikator Kinerja   | Target      | Realisasi   | Capaian (%) | SKPD   |
|----|-------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|--------|
|    |                                     | lainnya (%)   |             |             |             |        |
|    |                                     | Rasio Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG TKP3, PSW (AP,PPRG) (%)   | 100,00      | 100,00      | 100,00      | BPPMD  |
|    |                                     | Rasio Pembinaan Organisasi Wanita (BKOW dan lainnya) (%)  | 100,00      | 100,00      | 100,00      | BPPMD  |
|    |                                     | Rasio Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan(P2WKSS, GSI,APE) (%)   | 100,00      | 100,00      | 100,00      | BPPMD  |
|    |                                     | Prosentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan (Dalam dan Luar Provinsi) (%)                     | 100,00      | 100,00      | 100,00      | BPPMD  |
| 27 | Kependudukan dan Keluarga Berencana | Cakupan Peningkatan integrasi pengelolaan layanan Keluarga Berencana (orang)  | 80 Orang    | 80 Orang    | 100,00      | BPPMD  |
| 28 | Pemberdayaan Masyarakat Miskin      | Jumlah masyarakat miskin yang memperoleh pemberdayaan sosial  | 1.330 KK    | 1.330 KK    | 100,00      | Dinsos |
|    |                                     | Jumlah komunitas masyarakat terpencil yang diberdayakan   | 250 KK      | 250 KK      | 100,00      | Dinsos |
|    |                                     | Rasio pembinaan kelembagaan penanggulangan kemiskinan melalui TKPKD (Pengelola PNPM Perdesaan Perkotaan dan jenis PNPM lainnya) (%) | 45,00       | 45,00       | 100,00      | BPPMD  |
| 29 | Rehabilitasi Sosial                 | Jumlah Lanjut Usia yang dilayani dan dilindungi   | 905 Orang   | 905 Orang   | 100,00      | Dinsos |
|    |                                     | Jumlah Anak yang dilayani, dilindungi dan direhabilitasi  | 1.156 Orang | 1.156 Orang | 100,00      | Dinsos |

| No | Program                                       | Indikator Kinerja  | Target      | Realisasi    | Capaian (%) | SKPD   |
|----|---|--|-------------|--------------|-------------|--------|
|    |   | Jumlah Penyandang Cacat yang direhabilitasi  | 530 Orang   | 530 Orang    | 100,00      | Dinsos |
|    |   | Jumlah lembaga sosial anak yang dibina   | 20 Lembaga  | 20 Lembaga   | 100,00      | Dinsos |
|    |   | Jumlah tuna sosial yang direhabilitasi   | 680 Orang   | 680 Orang    | 100,00      | Dinsos |
|    |   | Jumlah PMKS yang memperoleh pelayanan, perlindungan dan bimbingan lanjut Balai Perlindungan Sosial (BPS)                               | 307 Orang   | 307 Orang    | 100,00      | Dinsos |
|    |   | Jumlah PMKS yang memperoleh bimbingan sosial dan keterampilan dan bimbingan lanjut pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial (BP2S) | 450 Orang   | 450 Orang    | 100,00      | Dinsos |
| 30 | Perlindungan dan Jaminan Sosial               | Jumlah Korban Tindak Kekerasan/Pekerja Migran yang dilindungi (Orang)  | 50 Orang    | 50 Orang     | 100,00      | Dinsos |
|    |   | Jumlah bantuan untuk korban bencana (Orang)  | 4.500 Orang | 4.500 Orang  | 100,00      | Dinsos |
|    |   | Jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang dilatih (Orang)  | 1.286 Orang | 1.286 Orang  | 100,00      | Dinsos |
|    |   | Jumlah Masyarakat yang mendapat jaminan Sosial (Orang)   | 366 Orang   | 48.881 Orang | 13.355      | Dinsos |
| 31 | Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial yang dibina (Orang)   | 604 Orang   | 604 Orang    | 100,00      | Dinsos |
|    |   | Jumlah Kelembagaan sosial yang dibina (Lembaga)  | 550 Lembaga | 310 Lembaga  | 56,36       | Dinsos |
|    |   | Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan (NK3)   | 400 Orang   | 400 Orang    | 100,00      | Dinsos |

| No | Program   | Indikator Kinerja   | Target      | Realisasi   | Capaian (%) | SKPD          |
|----|---|---|-------------|-------------|-------------|---------------|
|    |   | Jumlah Penyuluhan Sosial yang dilaksanakan (Orang)                                    | 200 Orang   | 200 Orang   | 100,00      | Dinsos        |
|    |   | Cakupan kegiatan peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan           | 12 Kegiatan | 12 Kegiatan | 100,00      | Biro Kesra    |
|    |   | Cakupan kelembagaan kelompok/badan/lembaga/ organisasi keagamaan yang terfasilitasi   | 600 Lembaga | 600 Lembaga | 100,00      | Biro Kesra    |
| 32 | Pengembangan Kelembagaan, Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja | Tingkat Hubungan Industrial, Kesejahteraan Pekerja dan Perlindungan Tenaga Kerja (%)  | 4,29        | 5,84        | 136,13      | Disnakertrans |
| 33 | Peningkatan Produktivitas, Perluasan, Kesempatan Kerja dan Berusaha         | Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka 0,5% setiap Tahunnya (%)                      | 11,06       | 9,55        | 86,35       | Disnakertrans |
| 34 | Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja                                       | Cakupan kegiatan peningkatan Keterampilan dan Kesempatan Tenaga Kerja                 | 528 Orang   | 1.440 Orang | 272,73      | Disnakertrans |
| 35 | Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM                              | Persentase Koperasi dan UMKM yang terakses sumber-sumber permodalan (%)               | 16,28       | 24,03       | 147,60      | Dinkop-Umkm   |
|    |   | Tingkat pertumbuhan usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan (%)     | 16,28       | 15,50       | 95,21       | Dinkop-Umkm   |
| 36 | Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM                                    | Tingkat layanan teknologi, inovasi, daya saing, dan mutu produk koperasi dan UMKM (%) | 27,00       | 26,16       | 96,89       | Dinkop-Umkm   |
|    |   | Tingkat layanan akses akses pasar dan pemasaran bagi produk koperasi dan              | 27,00       | 26,10       | 96,67       | Dinkop-Umkm   |

| No | Program   | Indikator Kinerja   | Target       | Realisasi     | Capaian (%) | SKPD              |
|----|---|---|--------------|---------------|-------------|-------------------|
|    |   | UMKM (%)  |              |               |             |                   |
| 37 | Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM K-UMKM      | Pesentase peningkatan kapasitas kelembagaan dan produktivitas Koperasi dan UMKM (%) | 18,66        | 17,98         | 96,36       | Dinkop-Umkm       |
| 38 | Peningkatan Iklim Investasi                                       | Cakupan layanan regulasi perijinan bidang Penanaman Modal (%)                       | 18,66        | 17,86         | 95,71       | BKPMPT            |
| 39 | Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi                       | Nilai Realisasi Investasi PMA (Rp)  | 25,00        | 25,00         | 100,00      | BKPMPT            |
| 40 | Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya | Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan (%)                            | 9,38 Trilyun | 34,31 Trilyun | 365,78      | Disbudpar         |
|    |   | Meningkatnya pelestarian tradisi masyarakat adat (%)                                | 4,05 Trilyun | 10,70 Trilyun | 264,20      | Disbudpar         |
|    |   | Meningkatnya pelestarian nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal (%)                 | 20,00        | 11,05         | 55,25       | Disbudpar         |
|    |   | Meningkatnya pelestarian dan perlindungan cagar budaya, museum dan kesejarahan (%)  | 20,00        | 12,00         | 60,00       | Disbudpar         |
| 41 | Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik                  | Cakupan pembinaan lembaga yang terbina sadar politik (%)                            | 363          | 363           | 100,00      | Badan Kesbangpol  |
|    |   | Cakupan pembinaan lembaga yang sadar kerukunan (%)                                  | 426          | 426           | 100,00      | Badan Kesbangpol  |
|    |   | Cakupan kegiatan Pemeliharaan Stabilitas Daerah (%)                                 | 100,00       | 100,00        | 100,00      | Badan Kesbangpol  |
| 42 | Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum        | Rasio Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum (%)           | 100,00       | 88,89         | 88,89       | Biro Pemerintahan |
|    |   | Rasio Fasilitasi Administrasi   | 100,00       | 100,00        | 100,00      | Biro Pemerintahan |

| No | Program  | Indikator Kinerja  | Target     | Realisasi  | Capaian (%) | SKPD                    |
|----|--|--|------------|------------|-------------|-------------------------|
|    |  | Pertanahan (%)   |            |            |             | an                      |
|    |  | Jumlah Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dan Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa | 2 Dokumen  | 2 Dokumen  | 100,00      | Biro Ekbang             |
|    |  | Rasio Kegiatan Fasilitasi LPSE Provinsi Banten (%)   | 100,00     | 100,00     | 100,00      | Biro Ekbang             |
|    |  | Koordinasi Pengendalian Inflasi daerah(%)  | 4,50       | 4,50       | 100,00      | Biro Ekbang             |
|    |  | Pengembangan dan Peningkatan Lembaga Keuangan daerah   | 9 Unit     | 9 Unit     | 100,00      | Biro Ekbang             |
|    |  | Penyusunan Bahan Kebijakan Pengembangan Perekonomian Daerah                                  | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 100,00      | Biro Ekbang             |
|    |  | Pengembangan Pelayanan Publikasi, Kerjasama Jaringan Media dan Informasi                     | 100,00     | 92,47      | 92,47       | Biro Humas Dan Protokol |
|    |  | Peningkatan Pengelolaan Informasi Komunikasi dan Dokumentasi                                 | 100,00     | 96,89      | 96,89       | Biro Humas Dan Protokol |
|    |  | Pengelolaan Sistem layanan Informasi Promosi   | 100,00     | 100,00     | 100,00      | Kantor Penghubung       |
|    |  | Meningkatnya kualitas dan kuantitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat                    | 16 Dokumen | 16 Dokumen | 100,00      | Biro Kesra              |
| 43 | Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat | Rasio Pengamanan, Pengawasan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris daerah (%)                 | 100,00     | 100,00     | 100,00      | Satpol-PP               |
|    |  | Rasio Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)                                      | 100,00     | 100,00     | 100,00      | Satpol-PP               |
|    |  | Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan   | 100,00     | 100,00     | 100,00      | Satpol-PP               |

| No | Program  | Indikator Kinerja   | Target        | Realisasi      | Capaian (%) | SKPD                       |
|----|--|---|---------------|----------------|-------------|----------------------------|
|    |  | Rasio Pendataan dan Tindaklanjut Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan(%)  | 100,00        | 100,00         | 100,00      | Satpol-PP                  |
| 44 | Penanggulangan Bencana                                 | Rasio Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana (%)   | 100,00        | 100,00         | 100,00      | BPBD                       |
|    |  | Rasio Ketersediaan Peralatan dan Logistik, Pos Bencana dan Tanggap Darurat Bencana. (%)   | 100,00        | 100,00         | 100,00      | BPBD                       |
|    |  | Rasio Bantuan dan Rehabilitasi Pemulihan Kondisi Pasca Bencana (%)  | 100,00        | 99,85          | 99,85       | BPBD                       |
| 45 | Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah                   | Rasio fasilitasi pengelolaan perlengkapan dan aset daerah (%)   | 100,00        | 100,00         | 100,00      | Biro Perlengkapan Dan Aset |
| 46 | Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Rp)  | 6,310 Trilyun | 10,830 Trilyun | 171,63      | DPPKD                      |
|    |  | Ketersediaan jumlah sistem/data/dokumen/informasi penunjang peningkatan pendapatan daerah (unit)                                    | 3,838 Trilyun | 4,972 Trilyun  | 129,55      | DPPKD                      |
|    |  | Ketersediaan Sistem/Data/Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (unit)   | 3 Unit        | 3 Unit         | 100,00      | DPPKD                      |
|    |  | Persentase ketepatan waktu pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (%) | 100,00        | 100,00         | 100,00      | DPPKD                      |
|    |  | Cakupan fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi  | 100,00        | 100,00         | 100,00      | DPPKD                      |



| No | Program  | Indikator Kinerja  | Target | Realisasi | Capaian (%) | SKPD            |
|----|--|--|--------|-----------|-------------|-----------------|
|    |  | (%)  |        |           |             |                 |
| 47 | Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah        | Rasio ketersediaan dokumen penataan Kelembagaan Perangkat Daerah, Lembaga lain bagian perangkat daerah, Ketatalaksanaan, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Perangkat Daerah. (%) | 100,00 | 100,00    | 100,00      | Biro Organisasi |
| 48 | Pembinaan Karier dan Administasi Kepegawaian Aparatur            | Rasio Pembinaan dan Kesejahteraan PNS Provinsi Banten .(%)   | 100,00 | 100,00    | 100,00      | BKD             |
|    |  | Rasio Pelayanan Administrasi Kepegawaian .(%)  | 100,00 | 98,16     | 98,16       | BKD             |
|    |  | Rasio Pengembangan Sumber Daya Aparatur .(%)   | 100,00 | 70,37     | 70,37       | BKD             |
| 49 | Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur                               | Rasio Penyelenggaraan Diklat dan Bimtek Aparatur .(%)  | 100,00 | 97,47     | 97,47       | Badan Diklat    |
|    |  | Rasio Ketersediaan Bahan Penunjang Kediklatan dan Bimtek Aparatur. (%)   | 100,00 | 100,00    | 100,00      | Badan Diklat    |
| 50 | Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah             | Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan   | 100,00 | 100,00    | 100,00      | 42 SKPD         |
|    |  | Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan   | 100,00 | 100,00    | 100,00      | 42 SKPD         |
| 51 | Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur | Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan   | 100,00 | 100,00    | 100,00      | 37 SKPD         |

| No | Program  | Indikator Kinerja  | Target | Realisasi | Capaian (%) | SKPD             |
|----|--|--|--------|-----------|-------------|------------------|
|    |  | Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke Luar Daerah                                | 100,00 | 100,00    | 100,00      | 37 SKPD          |
|    |  | Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur                        | 100,00 | 100,00    | 100,00      | 37 SKPD          |
|    |  | Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian                               | 100,00 | 100,00    | 100,00      | 37 SKPD          |
| 52 | Pembinaan, Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur       | Rasio Peningkatan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur.(%)                                     | 100,00 | 100,00    | 100,00      | Inspektorat      |
| 53 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | Jumlah Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang Terakomodir dalam Rencana Pembangunan Daerah                 | 100,00 | 100,00    | 100,00      | Sekretariat DPRD |
|    |  | Jumlah Kegiatan Pembahasan dan Penetapan RAPERDA Serta Keputusan DPRD  | 100,00 | 65,00     | 65,00       | Sekretariat DPRD |
|    |  | Jumlah Dukungan Layanan Komunikasi, Informasi, Publikasi Alat Kelengkapan DPRD dan Sosialisasi Produk Hukum DPRD | 100,00 | 100,00    | 100,00      | Sekretariat DPRD |
|    |  | Jumlah Kegiatan Pembahasan Rapat-rapat DPRD  | 100,00 | 100,00    | 100,00      | Sekretariat DPRD |
|    |  | Jumlah Kegiatan Pengawasan Oleh DPRD Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan                                   | 100,00 | 100,00    | 100,00      | Sekretariat DPRD |

| No | Program   | Indikator Kinerja   | Target       | Realisasi    | Capaian (%) | SKPD             |
|----|---|---|--------------|--------------|-------------|------------------|
|    |   | Pembangunan Daerah  |              |              |             |                  |
|    |   | Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas, Profesionalisme dan Ketersediaan Tenaga Ahli pendukung AKD | 100,00       | 98,00        | 98,00       | Sekretariat DPRD |
| 54 | Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Produk Hukum dan HAM             | Rasio ketersediaan Dokumen Produk Hukum (%)   | 20,00        | 29,37        | 146,85      | Biro Hukum       |
|    |   | Cakupan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum & HAM (%)  | 100,00       | 100,00       | 100,00      | Biro Hukum       |
| 55 | Penelitian, Pengembangan Kebijakan Strategis, Inovasi Daerah, dan IPTEK | Ketersediaan dokumen kebijakan hasil Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah (dok)             | 34 Dokumen   | 35 Dokumen   | 102,94      | Balitbangda      |
| 56 | Ketahanan Pangan Masyarakat   | Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Ton)   | 200 Ton      | 257,05 Ton   | 128,53      | BKPP             |
|    |   | Jumlah Cadangan Pangan Masyarakat (ton)   | 712,02 Ton   | 752,28 Ton   | 105,65      | BKPP             |
|    |   | Jumlah lembaga cadangan pangan masyarakat (Lembaga)   | 72 Lembaga   | 118 Lembaga  | 163,89      | BKPP             |
|    |   | Cakupan layanan fasilitasi program bantuan Raskin (%)   | 100,00       | 96,46        | 96,46       | BKPP             |
|    |   | Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat (Skors PPH)   | 93,00        | 84,50        | 90,86       | BKPP             |
|    |   | Jumlah daerah rawan pangan yang tertangani (Kecamatan)  | 10 Kecamatan | 10 Kecamatan | 100,00      | BKPP             |
|    |   | Cakupan layanan penyuluh pada daerah sentra   | 60,00        | 81,93        | 136,55      | BKPP             |

| No | Program                                       | Indikator Kinerja   | Target                       | Realisasi     | Capaian (%) | SKPD    |
|----|---|---|------------------------------|---------------|-------------|---------|
|    |   | produksi (%)  |                              |               |             |         |
| 57 | Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Perdesaan | Rasio Desa/Kel Yang Mengalami peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa/kelurahan   | 80,00                        | 80,00         | 100,00      | BPPMD   |
|    |   | Rasio Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan desa/kel (%)   | 12,00                        | 12,00         | 100,00      | BPPMD   |
|    |   | Cakupan Pengembangan Inovasi dan Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna  | Gelar TTG Tingkat Nasional 1 | Provinsi Aceh | 100,00      | BPPMD   |
|    |   | Rasio Penguatan Kemandirian Masyarakat Desa (Lembaga Keuangan Mikro Desa (BUMDes) (%)   | 85,00                        | 80,00         | 94,12       | BPPMD   |
|    |   | Rasio Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga Pedesaan setiap desa terhadap jumlah desa keseluruhan (Pasar Desa, UED-SPP, UPPKS, Lumbung Desa) (%) | 5,00                         | 5,00          | 100,00      | BPPMD   |
|    |   | Rasio pembinaan dan pengembangan Ekonomi masyarakat (BKM, peralihan pengelolaan PNPM (%)  | 6,38                         | 6,38          | 100,00      | BPPMD   |
|    |   | Cakupan Pembinaan Pemerintah Desa/Kel (pemerintah desa dan BPD)   | 6 desa/ke 1                  | 6 desa/kel    | 100,00      | BPPMD   |
|    |   | Cakupan pengembangan Pemerintahan Desa  | 1.261 desa                   | 1.238 desa    | 98,18       | BPPMD   |
| 58 | Penyediaan Data Pembangunan                   | Ketersediaan Data dan Informasi   | 42 Paket                     | 42 Paket      | 100,00      | 42 SKPD |

| No | Program   | Indikator Kinerja  | Target    | Realisasi | Capaian (%) | SKPD             |
|----|---|--|-----------|-----------|-------------|------------------|
|    | Daerah  | Pembangunan  |           |           |             |                  |
| 59 | Pembinaan Kearsipan Daerah                        | Persentase SKPD Provinsi yang pengelolaan arsipnya sesuai dengan ketentuan (%)   | 32 (74%)  | 32 (74%)  | 100,00      | BPAD             |
|    |   | Persentase cakupan koneksi Jaringan Informasi Kearsipan Provinsi (JKIP) dengan seluruh SKPD, Kab/Kota (%)  | 32 (74%)  | 32 (74%)  | 100,00      | BPAD             |
| 60 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Telematika | Meningkatnya penyelenggaraan dan pelayanan aksesibilitas serta kapasitas Telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika sejumlah 100% tahun 2017. (%) | 85,26     | 83,52     | 97,96       | Dishub kominfo   |
|    |   | Cakupan Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan Lembaga Penyiaran (%)  | 40,00     | 82,86     | 207,15      | Sekretariat KPID |
|    |   | Cakupan Pemantauan Isi Siaran Radio dan Televisi (%)   | 40,00     | 87,03     | 217,58      | Sekretariat KPID |
|    |   | Cakupan Penyelenggaraan Perizinan Penyiaran (%)  | 100,00    | 100,00    | 100,00      | Sekretariat KPID |
| 61 | Pengembangan Minat dan Budaya Baca                | Tingkat kunjungan perpustakaan per hari (%)  | 320 (64%) | 305 (64%) | 95,31       | BPAD             |
|    |   | Meningkatnya kunjungan ke website BPAD (%)   | 80 (64%)  | 205 (64%) | 256,25      | BPAD             |
| 62 | Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan           | Peningkatan Jumlah Perpustakaan sesuai standar (%)   | 26 (62%)  | 25 (62%)  | 96,15       | BPAD             |

| No | Program  | Indikator Kinerja   | Target             | Realisasi          | Capaian (%)     | SKPD    |
|----|--|---|--------------------|--------------------|-----------------|---------|
| 63 | Kepemudaan dan Kepramukaan                       | Jumlah organisasi pramuka yang mendapatkan pelayanan Kepramukaan (unit)                       | 9 Kwartir          | 9 Kwartir          | 100,00          | Dispora |
|    |  | Jumlah Kelompok/ Organisasi Kepemudaan yang berperan dalam kewirausahaan (kel)                | 16 Kelompok        | 25 Kelompok        | 156,25          | Dispora |
| 64 | Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga | Rasio Cabang Olahraga Berprestasi terhadap jumlah kejuaraan tingkat nasional/regional (event) | 19 Cabor/ 18 Event | 18 Cabor/ 20 Event | 94,74%/ 111,11% | Dispora |
|    |  | Tingkat pemenuhan prasarana dan sarana olahraga   | 1 Unit             | 1 Unit             | 100,00          | Dispora |

Tabel 2.3  
Capaian Indikator Kinerja Per Program  
Pada Penyelenggaraan Urusan Pilihan

| No | Program   | Indikator Kinerja  | Target         | Realisasi      | Capaian (%) | SKPD      |
|----|---|--|----------------|----------------|-------------|-----------|
| 1  | Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan | Peningkatan Produksi Padi (GKG) (ton)                            | 2.237.344 Ton  | 2.172.873 Ton  | 97,12       | Distanak  |
|    |   | Surplus Beras (ton)  | 56.855 Ton     | 25.532 Ton     | 44,91       | Distanak  |
|    |   | Penyediaan Benih Sumber Padi (ha)                                | 30.000 Ha      | 4.715 Ha       | 15,72       | Distanak  |
|    |   | Penyediaan Cadangan Benih Daerah (CBD) Padi (ha)                 | 80.000 Ha      | 170.470 Ha     | 213,09      | Distanak  |
|    |   | Produksi Hortikultura (Durian, Manggis, Melon, Cabe Besar) (ton) | 29.342 Ton     | 65.453 Ton     | 223,07      | Distanak  |
|    |   | Produksi Daging (sapi dan kerbau) (ton)                          | 32.669.754 Ton | 40.882.390 Ton | 125,14      | Distanak  |
|    |   | Cakupan peningkatan upaya-upaya                                  | 500 Ha         | 1.700 Ha       | 340,00      | Dishutbun |

| No | Program   | Indikator Kinerja   | Target          | Realisasi      | Capaian (%) | SKPD      |
|----|---|---|-----------------|----------------|-------------|-----------|
|    |   | rehabilitasi, diversifikasi, intensifikasi dan peremajaan tanaman perkebunan (ha) |                 |                |             |           |
|    |   | Cakupan ketersediaan sumber benih tanaman perkebunan (unit)                       | 3 Unit          | 3 Unit         | 100,00      | Dishutbun |
|    |   | Jumlah unit usaha perkebunan terpadu (agrowisata) (unit)                          | 1 Unit          | 1 Unit         | 100,00      | Dishutbun |
|    |   | cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pembangunan perkebunan (unit) | 3 Unit          | 3 Unit         | 100,00      | Dishutbun |
|    |   | Cakupan ketersediaan benih tanaman perkebunan yang berkualitas (batang)           | 107.000 Batang  | 200.000 Batang | 186,92      | Dishutbun |
|    |   | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)   | 68.025 Ton      | 53.954 Ton     | 79,31       | DKP       |
|    |   | Nilai Tukar Nelayan (NTN)   | > 100           | 116,87         | 116,87      | DKP       |
|    |   | Jumlah Produksi Benih Ikan (Milyar Ekor)  | 1,5 Milyar Ekor | 4 Milyar Ekor  | 266,67      | DKP       |
|    |   | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)  | 170.000 Ton     | 105.961 Ton    | 62,33       | DKP       |
| 2  | Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk Peternakan, | Nilai Tukar Petani (NTP)  | 105             | 104,75         | 99,76       | Distanak  |
|    |   | Cakupan Penerapan Good Agricultural Practice (GAP) /                              | 4 Unit          | 11 Unit        | 275,00      | Distanak  |

| No | Program  | Indikator Kinerja  | Target   | Realisasi    | Capaian (%) | SKPD      |
|----|--|--|--|--------------|-------------|-----------|
|    | Perikanan, Pertanian dan Perkebunan  | Standar Operational Procedure (SOP) Hortikultura (unit)                                      |  |              |             |           |
|    |  | Cakupan kemitraan Kelompok Tani dan Dunia Usaha (unit)                                       | 9 Unit   | 11 Unit      | 122,22      | Distanak  |
|    |  | Tingkat perkembangan jumlah aneka usaha kehutanan dan perkebunan (unit)                      | 6 Unit   | 6 Unit       | 100,00      | Dishutbun |
|    |  | Cakupan tingkat kemantapan tata usaha dan pembinaan industri kehutanan dan perkebunan (unit) | 250 Unit   | 250 Unit     | 100,00      | Dishutbun |
|    |  | Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB  | 0,77   | 0,52         | 67,53       | DKP       |
|    |  | Jumlah Ekspor Perikanan (Ton)  | 3.250 Ton  | 4554,00      | 140,12      | DKP       |
|    |  | Tingkat Kosumsi Ikan (Kg/Kapita)   | 28 Kg/Kapita   | 31 Kg/Kapita | 110,71      | DKP       |
| 3  |  | Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan      | Cakupan Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pertanian (unit) | 5 Unit       | 15 Unit     | 300,00    |
|    | Cakupan Peningkatan Akses Kelompok tani terhadap Perbankan (unit)                    |  | 26 Unit  | 28 Unit      | 107,69      | Distanak  |
|    | Cakupan tingkat pemanfaatan teknologi terapan bidang kehutanan dan perkebunan (unit) |  | 2 Unit   | 2 Unit       | 100,00      | Dishutbun |



| No | Program   | Indikator Kinerja   | Target      | Realisasi   | Capaian (%) | SKPD      |
|----|---|---|-------------|-------------|-------------|-----------|
|    |   | Peningkatan jumlah kelompok usaha mandiri (unit)  | 20 Unit     | 0,00        | 0,00        | DKP       |
| 4  | Peningkatan Daya Dukung Sumberdaya Pertanian        | Cakupan ketersediaan Traktor (unit)   | 31 Unit     | 80 Unit     | 258,06      | Distanak  |
|    |   | Cakupan ketersediaan Rice Milling Unit (RMU) (unit)   | 2 Unit      | 11 Unit     | 550,00      | Distanak  |
|    |   | Cakupan Pengembangan Jaringan Irigasi (Ha)  | 3.500 Ha    | 48.200 Ha   | 1.377,14    | Distanak  |
| 5  | Peningkatan daya dukung sumber daya hutan dan lahan | Cakupan pengendalian penggunaan kawasan hutan (unit)  | 6 Unit      | 6 Unit      | 100,00      | Dishutbun |
|    |   | Peningkatan jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan (kelompok)          | 10 Kelompok | 10 Kelompok | 100,00      | Dishutbun |
| 6  | Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi          | Tingkat penambahan jumlah Instalasi dan Sambungan Rumah Terpasang (SS)                        | 25.000 SS   | 25.000 SS   | 100,00      | Distamben |
|    |   | Persentase tingkat pemenuhan Kebutuhan Jaringan Listrik di KP3B (%)                           | 314 Unit    | 300 Unit    | 95,54       | Distamben |
|    |   | Tingkat penambahan jumlah Unit Terpasang Pembangkit dan Reaktor dari Energi Terbarukan (Unit) | 100,00      | 100,00      | 100,00      | Distamben |
| 7  | Pengelolaan dan Pemanfaatan                         | Cakupan ketersediaan Laporan Pemetaan,  | 9 Dokumen   | 23 Dokumen  | 255,56      | Distamben |

| No | Program   | Indikator Kinerja  | Target    | Realisasi | Capaian (%) | SKPD      |
|----|---|--|-----------|-----------|-------------|-----------|
|    | Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi | Penelitian, Pengembangan dan Sumber Data Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi (Dok) |           |           |             |           |
|    |   | Cakupan ketersediaan sarana pengendalian dan konservasi air tanah  | 4 Unit    | 4 Unit    | 100,00      | Distamben |
| 8  | Pengembangan, Pengusahaan Potensi dan Produk Pertambangan dan Energi            | Cakupan layanan Penerbitan Dokumen Perijinan yang menjadi Kewenangan Provinsi  | 10 Ijin   | 238 Ijin  | 2.380       | Distamben |
|    |   | Cakupan layanan Kesepakatan Kerjasama Bidang Pertambangan dan Energi (Dokumen)   | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00      | Distamben |
|    |   | Cakupan layanan informasi data bidang pertambangan dan energi yang siap dipublikasikan (unit)                                  | 4 Unit    | 4 Unit    | 100,00      | Distamben |
| 9  | Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata   | Meningkatnya pengembangan daya tarik wisata (%)  | 20,00     | 0,00      | 0,00        | Disbudpar |
|    |   | Meningkatnya kualitas pengelolaan destinasi wisata (%)   | 23,08     | 13,86     | 60,05       | Disbudpar |
|    |   | Meningkatnya pengembangan produk dan usaha pariwisata (%)  | 20,00     | 9,40      | 47,00       | Disbudpar |
|    |   | Meningkatnya promosi wisata dalam negeri dan   | 19,84     | 11,82     | 59,58       | Disbudpar |

| No | Program  | Indikator Kinerja   | Target   | Realisasi | Capaian (%) | SKPD        |
|----|--|---|----------|-----------|-------------|-------------|
|    |  | luar negeri (%)   |          |           |             |             |
| 10 | Pengembangan Kemitraan Kepariwisata                        | Tingkat penguatan kemitraan pariwisata, usaha ekonomi kreatif dan lembaga/instansi pemerintah (%) | 20,00    | 12,00     | 60,00       | Disbudpar   |
|    |  | Rasio peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata (%)  | 19,67    | 4,93      | 25,06       | Disbudpar   |
|    |  | Rasio peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan instansi lainnya (%)               | 19,53    | 11,40     | 58,37       | Disbudpar   |
| 11 | Pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil | Luas Areal Konservasi Laut (Ha)   | 1 Ha     | 2 Ha      | 200,00      | DKP         |
|    |  | Jumlah Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Diselesaikan (Kasus)                             | 12 Kasus | 24 Kasus  | 200,00      | DKP         |
| 12 | Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan                   | Cakupan Peningkatan Prasarana dan Sarana Kelancaran Distribusi Perdagangan/ Pasar tradisional (%) | 20,00    | 20,00     | 100,00      | Disperindag |
|    |  | Cakupan Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen, dan Pengawasan Barang Beredar/Jasa (%)            | 20,00    | 20,00     | 100,00      | Disperindag |
| 13 | Peningkatan Daya Saing                                     | Cakupan Penataan Kawasan dan  | 20,00    | 20,00     | 100,00      | Disperindag |

| No | Program  | Indikator Kinerja   | Target | Realisasi | Capaian (%) | SKPD           |
|----|--|---|--------|-----------|-------------|----------------|
|    | Industri   | Penguatan Struktur industri (%)   |        |           |             |                |
|    |  | Cakupan Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru Bidang Industri (%)  | 20,00  | 20,00     | 100,00      | Disperindag    |
|    |  | Cakupan Peningkatan Mutu/Daya Saing, Stadarisasi dan Sertifikasi Produk (%)   | 20,00  | 20,00     | 100,00      | Disperindag    |
|    |  | Cakupan Kemitraan Usaha dan Pengembangan klaster industri (%)   | 20,00  | 20,00     | 100,00      | Disperindag    |
| 14 | Penyiapan, pengerahan dan Pembinaan Transmigrasi | Cakupan Penyiapan, Pelayanan, Pembinaan, dan Kebutuhan Masyarakat Transmigran Serta Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat (KK) | 350 KK | 122 KK    | 34,86       | Disnaker trans |
|    |  | Cakupan Fasilitas Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi (KK)  | 185 KK | 70 KK     | 37,84       | Disnaker trans |

## 2.2 EVALUASI DAN CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2016

Pemerintah Provinsi Banten pada Tahun 2016 telah melaksanakan 33 urusan, yaitu 25 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan. Penyelenggaraan Urusan tersebut dilaksanakan melalui 78 program dan 1.036 kegiatan yang dilaksanakan oleh 42 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai tugas pokok dan fungsinya.

### 2.2.1 Penyelenggaraan Urusan Wajib

Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten mengacu pada pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang sebesar Rp3.470.531.609.200,00 sampai dengan triwulan II realisasi sebesar Rp807.586.707.394,43 atau sebesar 23,27%. Adapun Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2016, sebagai berikut:

#### 1. Urusan Wajib Pendidikan

Pada Urusan Wajib Bidang Pendidikan didukung oleh 7 program dan 24 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Pendidikan sebesar Rp299.122.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp25.781.798.926,00 atau sebesar 8,62%, dan realisasi capaian Kinerja sebesar 23,88%, pelaksanaan program dimaksud adalah:

- 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pelaksanaan program ini didukung oleh 2 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp7.927.337.000,00 sampai dengan triwulan II baru terealisasi sebesar Rp902.808.500,00 atau sebesar 11,39%, dan realisasi capaian kinerja sebesar 27,27%.
- 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Pelaksanaan Program ini didukung oleh 4 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp17.046.663.000,00 sampai dengan triwulan II baru terealisasi sebesar Rp3.924.116.94,00 atau sebesar 23,02%, dan realisasi capaian kinerja sebesar 37,41%.
- 3) Program Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun, Pelaksanaan Program ini didukung oleh 4 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp235.233.200.000,00 sampai dengan triwulan II baru terealisasi sebesar Rp10.956.627.236,00 atau sebesar 4,66%, dan realisasi capaian kinerja sebesar 19,80%.
- 4) Program Peningkatan Mutu, Kesejahteraan dan Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pelaksanaan Program ini didukung oleh 3 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar

Rp14.856.800.000,00 sampai dengan triwulan II baru terealisasi sebesar Rp5,541,044,000,00 atau sebesar 37,30, dan realisasi capaian kinerja sebesar 40,50%.

- 5) Program Pendidikan Tinggi, Pelaksanaan Program ini didukung oleh 1 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp1.340.000.000,00 sampai dengan triwulan belum terealisasi.
- 6) Program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI), Pelaksanaan Program ini didukung oleh 6 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp17.005.000.000,00 sampai dengan triwulan II baru terealisasi sebesar Rp3.730.719.350,00 atau sebesar 21,94%, dan realisasi capaian kinerja sebesar 24,06%.
- 7) Program Peningkatan Mutu Tata Kelola dan Pencitraan Pendidikan, Pelaksanaan Program ini didukung oleh 4 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp5.713.000.000,00 sampai dengan triwulan II baru terealisasi sebesar Rp726.482.900,00 atau sebesar 12,72%, dan realisasi capaian kinerja sebesar 18,13%.

## 2. Urusan Wajib Kesehatan

Pada Urusan Wajib Bidang Kesehatan didukung oleh 6 program dan 43 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten, RSUD Banten dan RSUD Malingping. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Kesehatan sebesar Rp127.488.437.138,00 dan realisasi sebesar Rp20.444.831.461,00 atau sebesar 12,64%, dan realisasi capaian kinerja sebesar 39,85%, pelaksanaan program dimaksud adalah:

- 1) Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten dengan melaksanakan 3 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp2.400.000.000,00 sampai dengan triwulan II baru terealisasi sebesar Rp707.168.500,00 atau sebesar 29,47%, dan realisasi capaian kinerja sebesar 55,87%.
- 2) Program Pembinaan Upaya Kesehatan, Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten, dan RSUD Banten yang terbagi atas 12 kegiatan, antara lain: Dinas Kesehatan Provinsi Banten melaksanakan 7 kegiatan, sedangkan RSUD Banten melaksanakan 8 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar

Rp70.128.972.450,00 sampai dengan triwulan baru terealisasi sebesar Rp11.276.565.237,00 atau sebesar 16,08%, dan realisasi capaian kinerja sebesar 29,24%.

- 3) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten dengan melaksanakan 5 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp4.800.000.000,00 sampai dengan triwulan baru terealisasi sebesar Rp1.964.727.000,00 atau sebesar 40,93%, dan realisasi capaian kinerja sebesar 51,68%.
- 4) Program Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan. Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten dengan melaksanakan 4 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp15.567.790.000,00 sampai dengan triwulan baru terealisasi sebesar Rp242.392.000,00 atau sebesar 1,56%, dan realisasi capaian kinerja sebesar 17,36%.
- 5) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten dan RSUD Malingping yang terbagi atas 6 kegiatan, antara lain: Dinas Kesehatan Provinsi Banten melaksanakan 5 kegiatan, sedangkan RSUD Malingping melaksanakan 1 kegiatan, dengan jumlah pagu anggaran seluruhnya sebesar Rp24.308.690.000,00 sampai dengan triwulan II baru terealisasi sebesar Rp3.379.387.579,00 atau sebesar 13,90%, dan realisasi capaian kinerja sebesar 43,50%.
- 6) Program Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat, Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten, RSUD Malingping, dan RSUD Banten yang terbagi atas 7 kegiatan, antara lain: Dinas Kesehatan Provinsi Banten melaksanakan 2 kegiatan, RSUD Malingping melaksanakan 6 kegiatan, sedangkan RSUD Banten melaksanakan 2 kegiatan, dengan jumlah pagu anggaran seluruhnya sebesar Rp10.282.984.688,00 sampai dengan triwulan II baru terealisasi sebesar Rp2.874.591.145,00 atau sebesar 27,95%, dan realisasi capaian kinerja sebesar 41,49%.

### 3. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Pada Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup didukung oleh 2 program dan 14 kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup sebesar Rp16.417.360.000,00 dan realisasi sebesar Rp5.693.647.551,00 atau sebesar 34,68% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 21,96%, pelaksanaan program dimaksud adalah:

- 1) Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, Program ini dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten dengan melaksanakan 8 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp7.850.000.000,00 sampai dengan triwulan II baru terealisasi sebesar Rp2.714,619.491,00 atau sebesar 34,58, dan realisasi capaian kinerja sebesar 16,67%
- 2) Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, Program ini dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten yang terbagi atas 6 kegiatan, antara lain: Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten melaksanakan 3 kegiatan, dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten melaksanakan 3 kegiatan, dengan pagu anggaran seluruhnya sebesar Rp8.567.360.000.00, sampai dengan triwulan II terealisasi sebesar Rp2.979.028.060,00 atau sebesar 34,77%, dan realisasi capaian kinerja sebesar 27,25%.

### 4. Urusan Wajib Pekerjaan Umum.

Pada Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum didukung oleh 3 Program dan 55 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten, dan Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp1.306.722.640.600,00 dan



realisasi sebesar Rp308.486.376.743,00 atau sebesar 23,61% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 22,00%, pelaksanaan program dimaksud adalah:

- 1) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Program ini dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten dengan melaksanakan 27 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp879.833.157.600,00 sampai dengan triwulan II baru terealisasi sebesar Rp275.229.706.699,00 atau sebesar 31,28%, dan realisasi capaian kinerja sebesar 23,13%.
  - 2) Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air, Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten dengan melaksanakan 20 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp219.069.999.900,00 sampai dengan triwulan II baru terealisasi sebesar Rp27.164.102.180,00 atau sebesar 12,40%, dan realisasi capaian kinerja sebesar 35,85%.
  - 3) Program Pengembangan dan Revitalisasi Infrastruktur Permukiman, Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten dengan melaksanakan 8 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp207.819.483.100,00 sampai dengan triwulan II baru terealisasi sebesar Rp6.092.567.864,00 atau sebesar 2,93%, dan realisasi capaian kinerja sebesar 7,03%.
5. Urusan Wajib Penataan Ruang.

Pada Urusan Wajib Bidang Penataan Ruang didukung oleh 1 Program dan 3 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Penataan Ruang sebesar Rp5.957.000.000,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp1.901.378.650,00 atau sebesar 31,92% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 36,82 %, pelaksanaan program dimaksud adalah Program Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan.

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten yang terbagi atas 3 Kegiatan, antara lain: Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten melaksanakan 2 kegiatan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten melaksanakan 1 kegiatan, dengan pagu anggaran seluruhnya sebesar Rp5.957.000.000,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp1.901.378.650,00 atau sebesar 31,92% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 36,82 %.

6. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan.

Pada Urusan Wajib Bidang Perencanaan Pembangunan didukung oleh 3 program dan 18 kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten, Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten, dan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Perencanaan Pembangunan sebesar Rp23.911.856.000,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp8.549.988.455,00 atau sebesar 35,76% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 44,07%, pelaksanaan program dimaksud adalah:

1) Program Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah.

Program ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten dengan melaksanakan 9 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp11.900.000.000,00 sampai dengan triwulan II terealisasi sebesar Rp5.540.215.708,00 atau sebesar 46,56%, dan realisasi capaian kinerja sebesar 63,16%.

2) Program Pengendalian Pembangunan Daerah, Program ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten, dan Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten yang terbagi atas 7 kegiatan, dan Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten melaksanakan 3 kegiatan, dengan pagu anggaran seluruhnya

sebesar Rp10.254.000.000,00 sampai dengan triwulan II terealisasi sebesar Rp2.309.764.269,00 atau sebesar 22,53%, dan realisasi capaian kinerja sebesar 27,97%.

3) Program Kerjasama Pembangunan Daerah, Program ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten dan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten yang terbagi atas 2 kegiatan, antara lain: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten melaksanakan 1 kegiatan, dan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten melaksanakan 1 kegiatan, dengan pagu anggaran seluruhnya sebesar Rp1.757.856.000,00 sampai dengan triwulan II terealisasi sebesar Rp700.008.478,00 atau sebesar 39,82%, dan realisasi capaian kinerja sebesar 48,07%.

#### 7. Urusan Wajib Perumahan.

Pada Urusan Wajib Bidang Perumahan didukung oleh 1 program dan 2 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Perumahan sebesar Rp22.450.000.000,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp46.900.000,00 atau sebesar 0,21% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 1,26%, pelaksanaan program dimaksud adalah Program Pembinaan dan Penataan Perumahan, Program ini melaksanakan 2 kegiatan, dengan pagu anggaran seluruhnya sebesar Rp22.450.000.000,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp46.900.000,00 atau sebesar 0,21% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 1,26%.

#### 8. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga

Pada Urusan Wajib Bidang Kepemudaan dan Olah Raga didukung oleh 2 program dan 17 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp15.060.990.000,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp7.101.318.900,00 atau sebesar 47,15% dengan realisasi fisik sebesar 57,14%, pelaksanaan program dimaksud adalah:

- 1) Program Kepemudaan dan Kepramukaan, Program ini melaksanakan 7 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp5.929.560.000,00 sampai dengan triwulan II baru terealisasi sebesar Rp2.441.126.000,00 atau sebesar 41,17%, dan realisasi capaian kinerja sebesar 46,88%.
- 2) Program Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga, Program ini melaksanakan 10 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp9.131.430.000,00 sampai dengan triwulan II baru terealisasi sebesar Rp4.660.192.900,00 atau sebesar 51,03%, dan realisasi capaian kinerja sebesar 51,20%.

#### 9. Urusan Wajib Penanaman Modal.

Pada Urusan Wajib Bidang Penanaman Modal didukung oleh 2 program dan 5 kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Penanaman Modal sebesar Rp10.600.000.000,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp4.237.365.027,00 atau sebesar 39,98% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 51,08%, pelaksanaan program dimaksud adalah:

- 1) Program Peningkatan Iklim Investasi, Program ini melaksanakan 3 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp3.250.000.000,00 sampai dengan triwulan II baru terealisasi sebesar Rp962.728.500,00 atau sebesar 29,62%, dan realisasi capaian kinerja sebesar 34,75%.

2) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Program ini melaksanakan 2 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp7.350.000.000,00 sampai dengan triwulan II baru terealisasi sebesar Rp3.274.636.527,00 atau sebesar 44,55%, dan realisasi capaian kinerja sebesar 55,71%.

#### 10. Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pada Urusan Wajib Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah didukung oleh 3 program dan 12 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp20.850.000.000,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp6.085.239.060,00 atau sebesar 29,19% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 44,39%, pelaksanaan program dimaksud adalah:

1) Program Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM, Program ini melaksanakan 3 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp4.300.000.000,00 sampai dengan triwulan II baru terealisasi sebesar Rp1.601.174.390,00 atau sebesar 37,24%, dan realisasi capaian kinerja sebesar 50,16%.

2) Program Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM, Program ini melaksanakan 5 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp10.350.000.000,00 sampai dengan triwulan II baru terealisasi sebesar Rp2.596.069.880,00 atau sebesar 25,08%, dan realisasi capaian kinerja sebesar 41,57%.

3) Program Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM K-UMKM, Program ini melaksanakan 4 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp6.200.000.000,00 sampai dengan triwulan II baru terealisasi sebesar Rp1.887.994.790,00 atau sebesar 30,45%, dan realisasi capaian kinerja sebesar 41,43%.

#### 11. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pada Urusan Wajib Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil didukung oleh 1 program dan 2 kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp1.399.520.950,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp657.908.200,00 atau sebesar 47,01% dengan realisasi

capaian kinerja sebesar 56,31%, pelaksanaan program dimaksud adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan.

#### 12. Urusan Wajib Ketenagakerjaan.

Pada Urusan Wajib Bidang Ketenagakerjaan didukung oleh 3 program dan 14 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Ketenagakerjaan sebesar Rp29.700.000.000,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp7.980.663.010,00 atau sebesar 26,87% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 30,68%, pelaksanaan program dimaksud adalah:

- 1) Program Pengembangan Kelembagaan, Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja, Program ini melaksanakan 7 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp12.500.000.000,00 sampai dengan triwulan II baru terealisasi sebesar Rp3.180.925.950,00 atau sebesar 25,45%, dan realisasi capaian kinerja sebesar 43,69%.
- 2) Program Peningkatan Produktivitas, Perluasan, Kesempatan Kerja dan Berusaha, Program ini melaksanakan 5 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp10.500.000.000,00 sampai dengan triwulan II baru terealisasi sebesar Rp1.824.007.060,00 atau sebesar 17,37%, dan realisasi capaian kinerja sebesar 36,95%.
- 3) Program Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja, Program ini melaksanakan 2 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp6.700.000.000,00 sampai dengan triwulan II baru terealisasi sebesar Rp2.975.730.000,00 atau sebesar 44,41%, dan realisasi capaian kinerja sebesar 59,08%.

#### 13. Urusan Wajib Ketahanan Pangan.

Pada Urusan Wajib Bidang Ketahanan Pangan didukung oleh 1 program dan 10 kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Ketahanan Pangan sebesar Rp11.238.527.000,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp3.512.122.384,00 atau sebesar 31,25% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 39,37%, pelaksanaan program dimaksud adalah Program Ketahanan Pangan Masyarakat, program ini melaksanakan 10 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp11.238.527.000,00 dan

realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp3.512.122.384,00 atau sebesar 31,25% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 39,37%.

14. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pada Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didukung oleh 1 program dan 8 kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp9.261.480.500,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp4.140.870.500,00 atau sebesar 44,71% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 51,34%, pelaksanaan program dimaksud adalah Program Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Program ini melaksanakan 8 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp9.261.480.500,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp4.140.870.500,00 atau sebesar 44,71% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 51,34%.

15. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Pada Urusan Wajib Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera didukung oleh 1 program dan 1 kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebesar Rp225.250.000,00 dan realisasi sebesar Rp222.945.000,00 atau sebesar 98,98% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%, pelaksanaan program dimaksud adalah Program Kependudukan dan Keluarga Berencana, Program ini melaksanakan 1 kegiatan.

16. Urusan Wajib Perhubungan.

Pada Urusan Wajib Bidang Perhubungan didukung oleh 1 program dan 19 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Perhubungan sebesar Rp54.950.000.000,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp15.155.467.405,00 atau sebesar 27,58% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 30,60%, pelaksanaan program dimaksud adalah Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian, Program ini melaksanakan 17 kegiatan,

dengan pagu anggaran sebesar Rp54.950.000.000,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp15.155.467.405,00 atau sebesar 27,58% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 30,60%.

17. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika.

Pada Urusan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika didukung oleh 1 program dan 7 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dan Sekretariat Komisi Penyiaran Informasi Daerah Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika sebesar Rp27.760.000.000,00 dan realisasi sampau dengan triwulan II sebesar Rp9.300.096.650,00 atau sebesar 33,50% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 40,16%, pelaksanaan program dimaksud adalah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Telematika.

Program ini melaksanakan 7 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp27.760.000.000,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp9.300.096.650,00 atau sebesar 33,50% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 40,16%.

18. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Pada Urusan Wajib Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri didukung oleh 1 program dan 9 kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sebesar Rp14.610.000.000,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp7.792.957.460,00 atau sebesar 53,34% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 56,86%, pelaksanaan program dimaksud adalah Program Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik, Program ini melaksanakan 9 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp14.610.000.000,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp7.792.957.460,00 atau sebesar 53,34% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 56,86%.



19. Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Pada Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian didukung oleh 14 program dan 618 kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Provinsi Banten (42 SKPD). Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian sebesar Rp1.341.458.862.512,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp323.420.704.178,43 atau sebesar 24,11% dengan realisasi capaian kinerja seluruhnya sebesar 39,20%, pelaksanaan program dimaksud adalah:

1) Program Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum.

Pada Program ini dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten, Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten, Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten, Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Provinsi Banten, dan Kantor Penghubung Provinsi Banten yang terbagi atas 44 kegiatan, antara lain: Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten melaksanakan 9 Kegiatan, Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten melaksanakan 10 kegiatan, Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten melaksanakan 8 kegiatan,, Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Provinsi Banten melaksanakan 11 kegiatan, dan Kantor Penghubung melaksanakan 6 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp55.103.826.050,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp19.048.082.382,00 atau sebesar 34,57% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 41,87%.

2) Program Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, Program ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dengan melaksanakan 9 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp20.500.000.000,00 dan realisasi sampai

dengan triwulan II sebesar Rp8.074.571.950,00 atau sebesar 39,39% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 46,51%.

3) Program Penanggulangan Bencana, Program ini dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten dengan melaksanakan 8 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp27.251.090.000,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp8.420.225.857,00 atau sebesar 30,90% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 49,42%.

4) Program Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah.

Program ini dilaksanakan oleh Biro Perlengkapan dan Aset Provinsi Banten dengan melaksanakan 8 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp114.350.000.000,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp11.421.947.400,00 atau sebesar 9,99% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 31,05%.

5) Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten dengan melaksanakan 45 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp31.626.066.745,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp10.265.042.692,00 atau sebesar 32,46% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 36,72%.

6) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah.

Program ini dilaksanakan oleh Biro Organisasi Provinsi Banten dengan melaksanakan 7 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp5.639.770.500,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp2.705.159.368,00 atau sebesar 47,97% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50,17%.

7) Program Pembinaan Karier dan Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah.

Program ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten dengan melaksanakan 9 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp10.295.277.500,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp3.755.332.607,00 atau sebesar 36,48% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 46,81%.

8) Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur.

Program ini dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten dengan melaksanakan 9 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp37.578.752.000,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp14.808.749.384,00 atau sebesar 39,41% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 44,62%.

9) Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

Program ini dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (42 SKPD) yang terbagi atas 89 kegiatan. Pada 42 SKPD terdapat 35 SKPD masing-masing melaksanakan 2 kegiatan dengan nama kegiatan yang sama.

Adapun SKPD yang melaksanakan 1 kegiatan adalah RSUD Malingping. Kegiatan yang dimaksud adalah Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, sedangkan 6 SKPD lainnya melaksanakan kegiatan yang terbagi atas 18 kegiatan, antara lain: RSUD Banten melaksanakan 3 kegiatan, Dinas Koperasi dan UMKM melaksanakan 3 kegiatan, Sekretariat DPRD melaksanakan 3 kegiatan, Biro Umum melaksanakan 3 kegiatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan 3 kegiatan, dan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan melaksanakan 3 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp62.455.994.655,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp24.990.011.256,00 atau sebesar 40,01% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 48,99%

10) Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur.

Program ini dilaksanakan oleh 37 SKPD dilingkungan Provinsi Banten, dan terbagi atas 356 kegiatan, antara lain: Biro Organisasi melaksanakan 3 kegiatan, Biro Umum melaksanakan 14 kegiatan, Biro Perlengkapan dan Aset melaksanakan 2 kegiatan, Sekretariat DPRD melaksanakan 4 kegiatan, Kantor Inspektorat melaksanakan 5 kegiatan, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan 4 kegiatan, Dinas Kesehatan Provinsi Banten melaksanakan 12 kegiatan, Dinas Pendidikan melaksanakan 21 kegiatan, Dinas Pemuda dan Olahraga melaksanakan 9 kegiatan, Dinas Pertanian dan Peternakan melaksanakan 25 kegiatan, Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan 17 kegiatan, Dinas Sumber Daya Air dan

Permukiman Provinsi Banten melaksanakan 9 kegiatan, Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten melaksanakan 22 kegiatan, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah melaksanakan 39 kegiatan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten melaksanakan 15 kegiatan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika melaksanakan 17 kegiatan, Dinas Pertambangan dan Energi melaksanakan 5 kegiatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan 11 kegiatan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan 9 kegiatan, Dinas Sosial Provinsi Banten melaksanakan 13 kegiatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan 8 kegiatan, Dinas Koperasi dan UMKM melaksanakan 8 kegiatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten melaksanakan 6 kegiatan, Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten melaksanakan 9 kegiatan, Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan 5 kegiatan, Badan Pendidikan dan Pelatihan melaksanakan 5 kegiatan, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah melaksanakan 5 kegiatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan 5 kegiatan, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan melaksanakan 5 kegiatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan 4 kegiatan, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu melaksanakan 5 kegiatan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten melaksanakan 5 kegiatan, Kantor Penghubung melaksanakan 5 kegiatan, RSUD Malingping melaksanakan 4 kegiatan, Sekretariat Komisi Penyiaran Informasi Daerah melaksanakan 5 kegiatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan 5 kegiatan, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Banten melaksanakan 6 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp729.973.075.062,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp103.419.902.893,29 atau sebesar 14,17% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 19,83%.

11) Program Pembinaan, Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur.

Program ini dilaksanakan oleh Kantor Inspektorat Provinsi Banten melaksanakan 8 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp11.250.000.000,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II

sebesar Rp4.398.571.500,00 atau sebesar 39,10% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 44,15%.

12) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Banten dengan melaksanakan 9 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp219.260.010.000,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp69.608.820.452,00 atau sebesar 31,75% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 49,64%.

13) Program Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Produk Hukum dan HAM.

Program ini dilaksanakan oleh Biro Hukum Provinsi Banten dengan melaksanakan 10 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp6.375.000.000,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp2.927.184.910,00 atau sebesar 45,92% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50,85%.

14) Program Penelitian, Pengembangan Kebijakan Strategis Daerah dan IPTEK.

Program ini dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten dengan melaksanakan 8 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp9.800.000.000,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp3.991.702.652,00 atau sebesar 40,73% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 51,45%.

20. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pada Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didukung oleh 1 Program yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp12.900.069.500,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp9.676.080.900,00 atau sebesar 75,01% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 81,29%, pelaksanaan program dimaksud adalah Program Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Perdesaan.

Program ini melaksanakan 5 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp12.900.069.500,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar

Rp9.676.080.900,00 atau sebesar 75,01% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 81,29%.

## 21. Urusan Wajib Sosial.

Pada Urusan Wajib Bidang Sosial didukung oleh 4 program dan 19 kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten, Dinas Sosial Provinsi Banten, dan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Sosial sebesar Rp72.140.226.000,00 dan realisasi samapi dengan triwulan II sebesar Rp24.188.697.655,00 atau sebesar 33,53% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 37,94%, pelaksanaan program dimaksud adalah:

### 1. Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin.

Program ini dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten, dan Dinas Sosial Provinsi Banten yang terbagi atas 4 kegiatan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten melaksanakan 1 kegiatan, dan Dinas Sosial Provinsi Banten melaksanakan 3 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp7.860.000.000,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp3.154.913.000,00 atau sebesar 40,14% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 47,44%.

### 2. Program Rehabilitasi Sosial.

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Banten dengan melaksanakan 7 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp11.853.000.000,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp5.804.157.931,00 atau sebesar 48,97% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 50,30%.

### 3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Banten dengan melaksanakan 3 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp20.700.000.000,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp5.986.186.450,00 atau sebesar 28,92% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 29,58%.

### 4. Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan.

Program ini dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten, dan Dinas Sosial Provinsi Banten yang terbagi atas

5 kegiatan, yaitu: Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten melaksanakan 2 kegiatan, dan Dinas Sosial Provinsi Banten melaksanakan 3 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp31.727.226.000,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp9.243.440.274,00 atau sebesar 29,13% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 32,26%

#### 22. Urusan Wajib Kebudayaan.

Pada Urusan Wajib Bidang Kebudayaan didukung oleh 1 program dan 5 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Kebudayaan sebesar Rp8.122.149.500,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp2.874.411.850,00 atau sebesar 35,39% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 39,75%, pelaksanaan program dimaksud adalah Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya.

Program ini melaksanakan 5 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp8.122.149.500,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp2.874.411.850,00 atau sebesar 35,39% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 39,75%.

#### 23. Urusan Wajib Statistik.

Pada Urusan Wajib Bidang Statistik didukung oleh 1 program dan 42 kegiatan yang dilaksanakan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Provinsi Banten (42 SKPD). Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Statistik sebesar Rp23.613.239.500,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp6.990.145.841,00 atau sebesar 29,60% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 34,50%, pelaksanaan program dimaksud adalah yaitu: Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah.

Pelaksanaan program dimaksud terbagi atas 42 kegiatan dengan nama kegiatan yang sama, dengan pagu anggaran sebesar Rp23.613.239.500,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp6.990.145.841,00 atau sebesar 29,60% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 34,50%.

#### 24. Urusan Wajib Kearsipan.

Pada Urusan Wajib Bidang Kearsipan didukung oleh 1 program dan 4 kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip

Daerah Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Kearsipan sebesar Rp3.515.000.000,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp1.120.336.300,00 atau sebesar 31,87% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 36,87%, pelaksanaan program dimaksud adalah yaitu Program Pembinaan Kearsipan Daerah.

Program ini melaksanakan 4 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp3.515.000.000,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp1.120.336.300,00 atau sebesar 31,87% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 36,87%.

#### 25. Urusan Wajib Perpustakaan.

Pada Urusan Wajib Bidang Perpustakaan didukung oleh 2 Program dan 6 kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bidang Perpustakaan sebesar Rp11.057.000.000,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp2.224.455.288,00 atau sebesar 20,12% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 26,12%, pelaksanaan program dimaksud adalah:

##### 1) Program Pengembangan Minat dan Budaya Baca.

Program ini melaksanakan 3 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp2.426.000.000,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp1.073.387.636,00 atau sebesar 44,25% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 48,23%.

##### 2) Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan.

Program ini melaksanakan 3 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp8.631.000.000,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp1.151.067.652,00 atau sebesar 13,34% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 16,54%.

#### 2.2.1. Penyelenggaraan Urusan Pilihan

Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Pilihan Bidang sebesar Rp137.817.140.900,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp29.598.851.140,00 atau sebesar 21,84% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 27,26%. Adapun Urusan Pilihan Bidang yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 adalah sebagai berikut:



## 1. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan.

Pada Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan didukung oleh 1 program yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan sebesar Rp9.238.905.000,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp1.897.654.000,00 atau sebesar 20,54% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 25,67%, pelaksanaan program dimaksud adalah Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Program ini melaksanakan 4 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp9.238.905.000,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp1.897.654.000,00 atau sebesar 20,54% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 25,67%.

## 2. Urusan Pilihan Pertanian

Pada Urusan Pilihan Bidang Pertanian didukung oleh 4 program dan 58 kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten, Dinas Pertanian dan Peternakan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Pilihan Bidang Pertanian sebesar Rp61.754.722.000,00 dan realisasi sebesar Rp14.136.562.717,00 atau sebesar 22,89% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 28,62%, pelaksanaan program dimaksud adalah:

### 1) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan.

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Pertanian dan Peternakan yang terbagi atas 36 kegiatan, antara lain: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten melaksanakan 5 kegiatan, Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan 14 kegiatan, dan Dinas Pertanian dan Peternakan melaksanakan 17 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp33.690.522.000,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp10.039.595.507,00 atau sebesar 29,80% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 36,62%.

2) Program Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan.

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten, Dinas Pertanian dan Peternakan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten yang terbagi atas 15 kegiatan, antara lain: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten melaksanakan 5 kegiatan, Dinas Pertanian dan Peternakan melaksanakan 5 kegiatan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan 5 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp11.179.850.000,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp3.718.014.410,00 atau sebesar 33,62% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 38,33%.

3) Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan.

Program ini dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten, dan Dinas Pertanian dan Peternakan yang terbagi atas 6 kegiatan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten melaksanakan 3 kegiatan, dan Dinas Pertanian dan Peternakan melaksanakan 1 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp15.704.350.000,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp6.565.700.148,00 atau sebesar 41,81% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 52,82%.

4) Program Peningkatan Daya Dukung Sumberdaya Pertanian.

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten dengan melaksanakan 1 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp1.180.000.000,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp378.952.800,00 atau sebesar 32,11% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 39,55%.

3. Urusan Pilihan Kehutanan.

Pada Urusan Pilihan Bidang Kehutanan didukung oleh 1 program dan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Pilihan Bidang Kehutanan sebesar Rp1.450.000.000,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp605.895.000,00 atau sebesar 41,79% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 43,86%, pelaksanaan

program dimaksud adalah Program Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya Hutan dan Lahan.

Program ini melaksanakan 3 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp1.450.000.000,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp605.895.000,00 atau sebesar 32,11% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 39,55%.

#### 4. Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pada Urusan Pilihan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral didukung oleh 3 program dan 21 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Pilihan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp38.050.000.000,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp4.308.319.830,00 atau sebesar 11,32% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 27,22%, pelaksanaan program dimaksud adalah:

- 1) Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi, Program ini melaksanakan 11 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp30.153.000.000,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp1.867.816.274,00 atau sebesar 6,19% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 16,41%.
- 2) Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Program ini melaksanakan 7 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp5.978.000.000,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp1.600.425.955,00 atau sebesar 26,77% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 31,35%.
- 3) Program Pengembangan, Pengusahaan Potensi dan Produk Pertambangan dan Energi.  
Program ini melaksanakan 3 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp1.919.000.000,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp840.077.601,00 atau sebesar 43,78% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 49,30%.

#### 5. Urusan Pilihan Pariwisata.

Pada Urusan Pilihan Bidang Pariwisata didukung oleh 2 Program dan 10 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan

Pilihan Bidang Pariwisata sebesar Rp8.919.728.500,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp1.834.887.300,00 atau sebesar 20,57% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 29,46%, pelaksanaan program dimaksud adalah:

1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata.

Program ini melaksanakan 7 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp6.600.000.000,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp1.834.887.300,00 atau sebesar 27,80% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 37,36%.

2) Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisata.

Program ini melaksanakan 3 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp2.319.728.500,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp734.489.848,00 atau sebesar 30,66% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 35,96%

6. Urusan Pilihan Industri.

Pada Urusan Pilihan Bidang Industri didukung oleh 1 program dan 8 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Pilihan Bidang Industri sebesar Rp4.854.269.900,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp2.584.870.650,00 atau sebesar 53,25% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 57,25%, pelaksanaan program dimaksud adalah Program Peningkatan Daya Saing Industri.

Program ini melaksanakan 8 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp4.854.269.900,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp2.584.870.650,00 atau sebesar 53,25% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 57,25%.

7. Urusan Pilihan Perdagangan.

Pada Urusan Pilihan Bidang Perdagangan didukung oleh 1 program dan 8 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Pilihan Bidang Perdagangan sebesar Rp9.449.515.500,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp2.389.299.495,00 atau sebesar 25,28% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 30,62%, pelaksanaan program dimaksud adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan.

Program ini melaksanakan 8 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp9.449.515.500,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp2.389.299.495,00 atau sebesar 25,28% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 30,62%.

8. Urusan Pilihan Ketrasmigrasian.

Pada Urusan Pilihan Bidang Ketrasmigrasian didukung oleh 1 program dan 3 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Pilihan Bidang Ketrasmigrasian sebesar Rp4.100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.106.872.300,00 atau sebesar 27,00% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 38,78%, pelaksanaan program dimaksud adalah Program Penyiapan, Pengerahan dan Pembinaan Transmigrasi.

Program ini melaksanakan 3 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp4.100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.106.872.300,00 atau sebesar 27,00% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 38,78%.